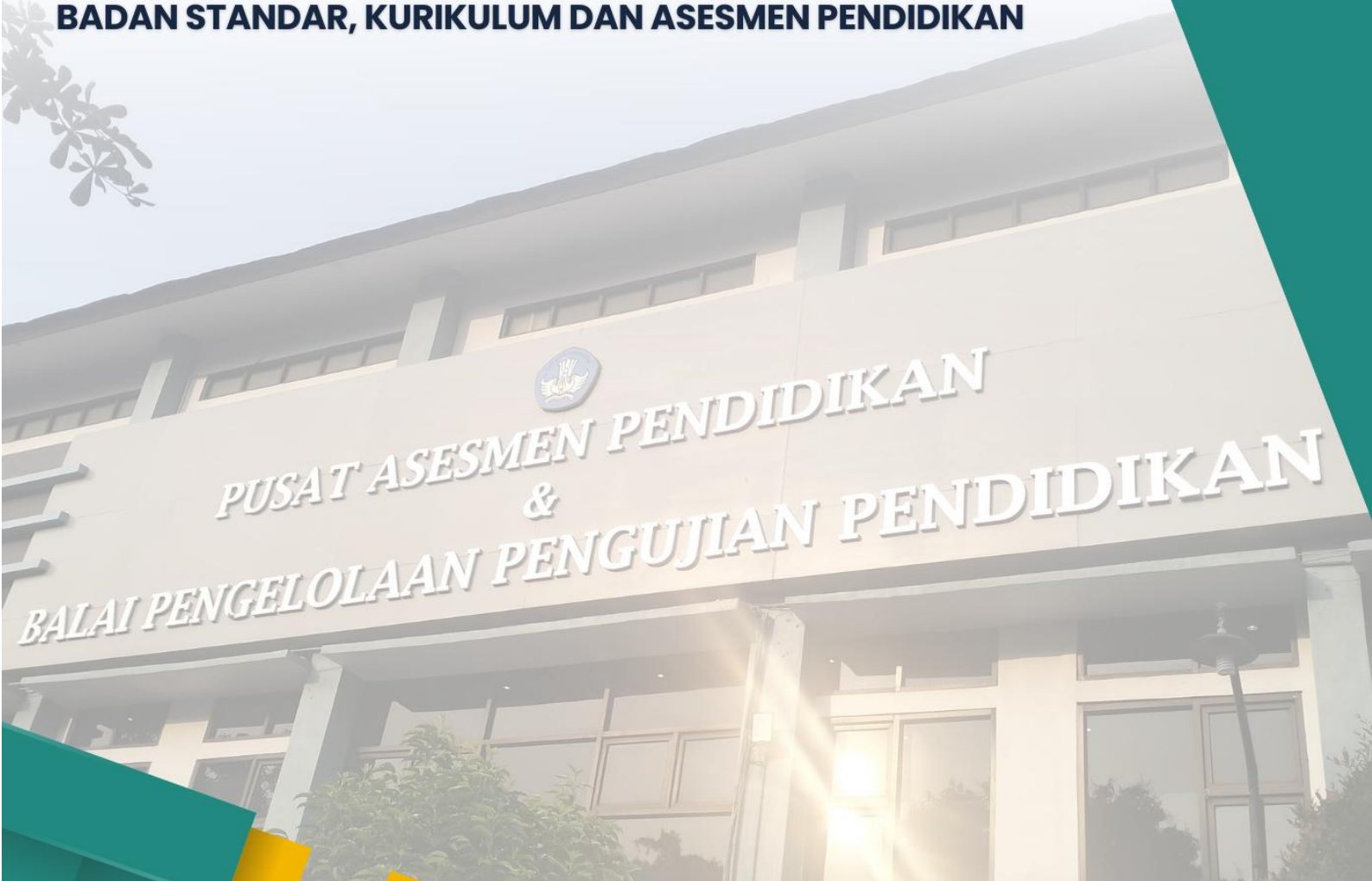




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN  
BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN**





### **Tim Penyusun**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Rahmawati         | Penanggung Jawab        |
| Ellis Darmayanti  | Ketua Tim Penyusun      |
| Andri Sutrisno    | Sekretaris Tim Penyusun |
| Winahyu           | Anggota Tim Penyusun    |
| Ana Lusiana       | Anggota Tim Penyusun    |
| Nova Indriani     | Anggota Tim Penyusun    |
| Marta N. Muhammad | Anggota Tim Penyusun    |

### **Tim Reviu**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Novita Indri Garini Lestari | Ketua Tim Reviu   |
| Arya Gamma Aditia           | Anggota Tim Reviu |
| Bayu Herprabowo             | Anggota Tim Reviu |

### **Tim Evaluasi SAKIP**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Andri Sutrisno              | Ketua Tim Evaluasi SAKIP   |
| Pande Putu Khrisna Ariyudha | Anggota Tim Evaluasi SAKIP |
| Bayu Herprabowo             | Anggota Tim Evaluasi SAKIP |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2024 tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Dokumen Laporan Capaian Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program layanan pengujian pendidikan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel.

Laporan Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai pencapaian yang telah dilakukan serta membantu dalam proses proses langkah-langkah ke depan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang teridentifikasi selama tahun tersebut.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang layanan pengujian pendidikan, serta menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Balai



Dr. Rahmawati, M.Ed



## DAFTAR ISI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| DAFTAR TABEL                                  | 5  |
| DAFTAR GAMBAR                                 | 6  |
| Ikhtisar Eksekutif                            | 7  |
| BAB I                                         | 12 |
| A. Gambaran Umum                              | 12 |
| B. Dasar Hukum                                | 13 |
| C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi | 14 |
| D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan             | 15 |
| BAB II                                        | 17 |
| A. Rencana Strategis                          | 17 |
| B. Program Prioritas                          | 18 |
| C. Rencana Kerja dan Anggaran                 | 20 |
| D. Perjanjian Kinerja                         | 21 |
| BAB III                                       | 24 |
| A. Akuntabilitas Kinerja                      | 24 |
| B. Realisasi Program/Agenda Prioritas         | 24 |
| C. Realisasi Anggaran                         | 24 |
| D. Kinerja Lain-lain                          | 24 |
| BAB IV                                        | 25 |
| LAMPIRAN                                      | 26 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Isu dan Peran Strategis BPPP                                     | 16 |
| Tabel 2. Matriks Perjanjian Kinerja BPPP 2020-2024                        | 18 |
| Tabel 3. Program Prioritas BPPP                                           | 20 |
| Tabel 4. Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran BPPP Tahun 2023 dan 2024      | 20 |
| Tabel 5. Target Renstra dan Target PK BPPP 2020-2024                      | 22 |
| Tabel 6. Perjanjian Kinerja (Awal)                                        | 24 |
| Tabel 7. Perjanjian Kinerja (Revisi)                                      | 25 |
| Tabel 8. Pengukuran Kinerja BPPP Tahun 2024                               | 26 |
| Tabel 9. Definisi Operasional IKK                                         | 28 |
| Tabel 10. Klasifikasi Produk Layanan                                      | 29 |
| Tabel 11. Definisi Operasional Renstra Pusat Asesmen Pendidikan 2020-2024 | 31 |
| Tabel 12. Matriks Realisasi Target                                        | 31 |
| Tabel 13. Jumlah peserta yang dilayani per Politeknik Pariwisata          | 45 |
| Tabel 14. Rincian Penyerapan Anggaran                                     | 47 |
| Tabel 15. Matriks Efisiensi Anggaran BPPP 2024                            | 49 |
| Tabel 16. Survei Kepuasan Layanan SNPMB                                   | 50 |
| Tabel 17. Hasil Survei                                                    | 51 |



## DAFTAR GAMBAR

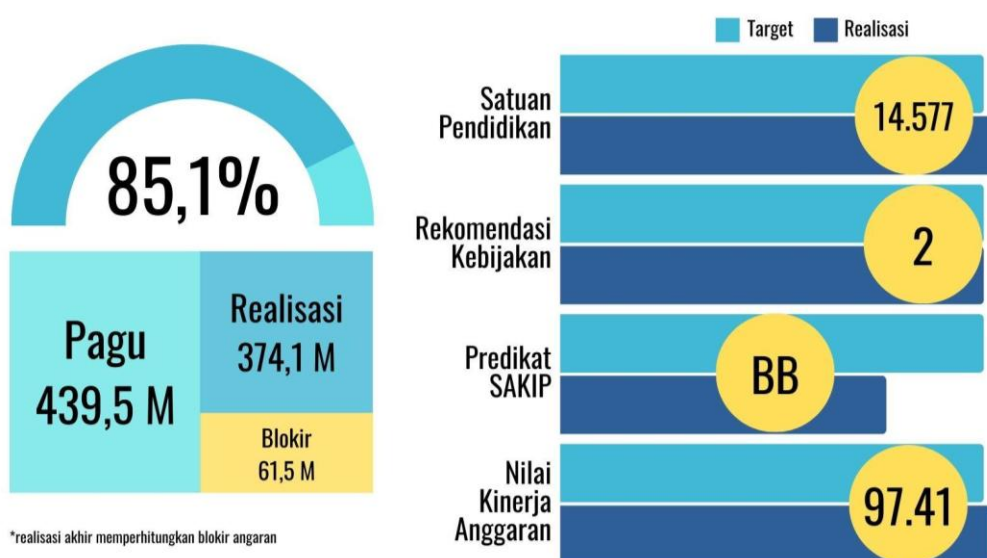
|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Capaian IKK BPPP Tahun 2024                                                                 | 7  |
| Gambar 2. Capaian Anggaran dan Kinerja BPPP tahun 2024                                                | 7  |
| Gambar 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2022-2024                                                    | 8  |
| Gambar 4. Kondisi SDM BPPP tahun 2024                                                                 | 12 |
| Gambar 5. Permendikbudristek No. 44 Tahun 2022 Tentang OTK BPPP                                       | 15 |
| Gambar 6. Layanan Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani                                         | 19 |
| Gambar 7. Jumlah Peserta SNBP 2023 dan 2024                                                           | 38 |
| Gambar 8. Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT                                                            | 41 |
| Gambar 9. Jumlah Peserta SNBT 2023 dan 2024                                                           | 41 |
| Gambar 10. Peserta Didik Kelas XII dan Satuan Pendidikan yang mendapatkan layanan Asesmen Bakat Minat | 42 |
| Gambar 11. Rekapitulasi Jumlah TUK/LPTK Pelaksana PPG                                                 | 45 |
| Gambar 12. Rekapitulasi Jumlah Peserta yang Terlayani kategori PPG                                    | 45 |
| Gambar 13. Hasil Pemetaan Bakat                                                                       | 53 |
| Gambar 14. Distribusi dari Predikat Bakat                                                             | 54 |
| Gambar 15. Persentase Minat Praktis dan Metodis                                                       | 55 |
| Gambar 16. Matriks Kesesuaian antara Bakat dan Minat                                                  | 55 |
| Gambar 17. Ikhtisar Pendapatan BPPP 2024                                                              | 56 |
| Gambar 18. Diagram Capaian Sasaran Kegiatan 1                                                         | 60 |
| Gambar 19. Diagram Indikator Capaian Sasaran Kegiatan 2                                               | 62 |

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian dari Sasaran Kegiatan (SK) berupa: Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan; dan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Kedua Sasaran Kinerja ini diturunkan ke dalam empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerja adalah sebagai berikut.

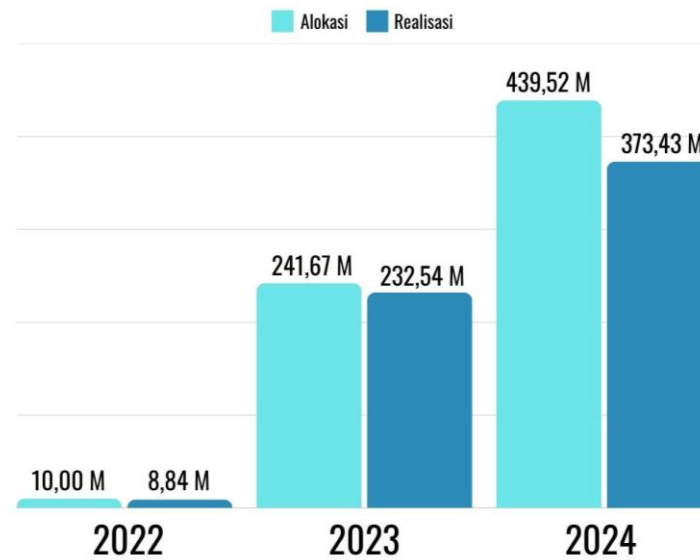


Gambar 1. Capaian IKK BPPP Tahun 2024



Gambar 2. Capaian Anggaran dan Kinerja BPPP tahun 2024

Berikut tren alokasi anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dari tahun 2022 sampai 2024.



Gambar 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2022-2024

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran tercantum mulai pada tahun 2022 dikarenakan BPPP merupakan satuan kerja baru yang dibentuk efektif pada akhir tahun 2022. Selama tahun 2022 hingga 2024 alokasi anggaran BPPP mengalami peningkatan serta pada tahun 2023 BPPP resmi menerapkan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga terdapat dua sumber dana yang dikelola yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut seiring dengan peningkatan volume sasaran/target pada program prioritas di BPPP dan Kemendikbudristek pada umumnya.

Selama tahun 2024, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- a. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas, terdapat beberapa kendala sebagai berikut.
  - 1) Kendala pada SNPMB yaitu terdapat PTN yang terkendala koordinasi dan komunikasi sehingga beberapa PTN terlambat dalam penyampaian berkas kontrak swakelola;
  - 2) Kendala pada UKPPPG yaitu terdapat peserta ujian yang mengalami kendala dalam instalasi aplikasi ujian, lokasi beberapa peserta ujian mengalami pemadaman listrik dan bencana alam seperti banjir. Di sisi lain pada beberapa lokasi ujian atau TUK/LPTK tidak terdapat genset sebagai mitigasi keadaan

kahar seperti halnya pemadaman listrik. Selain itu, pada beberapa lokasi khususnya LPTK baru sebagai lokasi ujian atau TUK mengalami kendala kurangnya SDM pengawas, dan terdapat kendala teknis aplikasi pelaksanaan ujian pada mata pelajaran Bimbingan Konseling;

- 3) Kendala pada Seleksi Bersama Masuk Politeknik Pariwisata Kemenparekraf yaitu terdapat peserta ujian yang menggunakan laptop pribadi dapat mengaktifkan menu *auto translate*, serta jaringan internet yang tidak stabil;
  - 4) Pada pelaksanaan Asesmen Bakat Minat (ABM) terdapat kendala teknis yaitu ada kendala dalam persiapan teknis sehingga pelaksanaan ABM bergeser jadwal pelaksanaannya di pertengahan triwulan IV tahun 2024, serta adanya kendala terkait akses aplikasi pada hari pertama pelaksanaan di awal sesi ABM sehingga memerlukan waktu tunggu yang cukup lama untuk memulai pengerjaan. Selain itu, faktor akses lokasi kondisi geografi berupa kepulauan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjangkau lokasi pelaksanaan.
- b. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen, beberapa kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.
- 1) Pada kegiatan Analisis Indeks Literasi Numerasi SNBP terdapat kendala kelengkapan data lintas tahun untuk setiap satuan pendidikan, serta diperlukan variabel lain dalam proses pengembangan model;
  - 2) Pada kegiatan Survey Pengembangan Kompetensi Guru terdapat kendala kelengkapan respon hasil survei;
- c. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan berupa Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, berikut ini beberapa kendala yang muncul.
- 1) Terdapat perbedaan pemahaman atas aturan dan kebijakan terkait kepegawaian, program dan anggaran, serta keuangan sehingga BPPP melakukan pengulangan pada sejumlah prosedur;
  - 2) Terdapat kendala dalam pengelolaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban dana dikarenakan kondisi linimasa yang cukup dinamis akibat adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan;

- 3) Pada penyusunan terdapat beberapa data atau dokumen pendukung yang belum terpenuhi dikarenakan terdapat program atau layanan yang masih berjalan sampai dengan periode akhir tahun.
- d. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, berikut ini kendala yang terjadi selama tahun 2024.
  - 1) Kendala dalam pengelolaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban dana dikarenakan kondisi linimasa yang cukup dinamis akibat adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan;
  - 2) Terdapat beberapa PTN yang terkendala koordinasi dan komunikasi sehingga melakukan pelaporan dan konfirmasi pengembalian atas sisa dana swakelola melewati batas waktu yang telah ditentukan;
  - 3) Terdapat beberapa LPTK yang terkendala pencairan dana swakelola ujian PPG karena kebijakan internal direktorat masing-masing yang berimplikasi kepada keterlambatan pelaporan dan pengembalian atas siswa dana swakelola.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul, antara lain:

- a. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas, upaya yang dilakukan antara lain.
  - 1) Melakukan penyesuaian pada tahapan persiapan akibat perubahan kebijakan pelaksanaan ujian;
  - 2) Melakukan analisa dan perhitungan ulang terkait kebutuhan anggaran akibat penambahan peserta UKPPPG, serta melakukan relokasi jenis sumber dana untuk swakelola pelaksanaan PPG;
  - 3) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengujian berikutnya, serta memaksimalkan tahap persiapan sebelum pelaksanaan ujian;
  - 4) Memanfaatkan jejaring dengan Balai Guru Penggerak untuk pendampingan peserta UKPPPG yang terkendala jaringan.
  - 5) Diadakan ujian susulan bagi peserta yang mengalami kendala teknis serta pendamping teknis dalam pelaksanaan ujian;

- 6) Melakukan optimalisasi sumber daya pada perangkat pusat sehingga meminimalisir kendala yang sama pada pelaksanaan selanjutnya.
- b. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen, upaya yang dilakukan antara lain.
  - 1) Penyesuaian metode imputasi sehingga seluruh satuan pendidikan dapat dilibatkan dalam proses analisis;
  - 2) Berkoordinasi dengan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) untuk koordinasi tambahan data yang dilibatkan dalam penyusunan model.
- c. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut.
  - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyamakan persepsi atas aturan dan kebijakan yang berlaku;
  - 2) Mengadopsi praktik baik berupa penyesuaian prosedur yang diberlakukan pada satuan kerja lain;
  - 3) Melakukan koordinasi dan penyusunan strategi dalam rangka percepatan penyelesaian layanan.
- d. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut.
  - 1) Pergeseran anggaran dilakukan untuk keperluan operasional perkantoran yang lebih mendesak supaya tercapai efisiensi;
  - 2) Melakukan benchmarking dengan Satker serupa atau pihak eksternal terkait serta langkah persiapan digitalisasi dan optimalisasi tata kelola Satker;
  - 3) Dilakukan koordinasi dengan pihak LPTK/PTN terkait pelaporan penggunaan dana kontrak swakelola serta evaluasi pelaksanaan anggaran pada LPTK/PTN, pada kasus tertentu Tim BPPP dengan pendampingan dari SPI melakukan monitoring dan evaluasi kepada beberapa PTN yang mengalami kendala penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban dana swakelola.

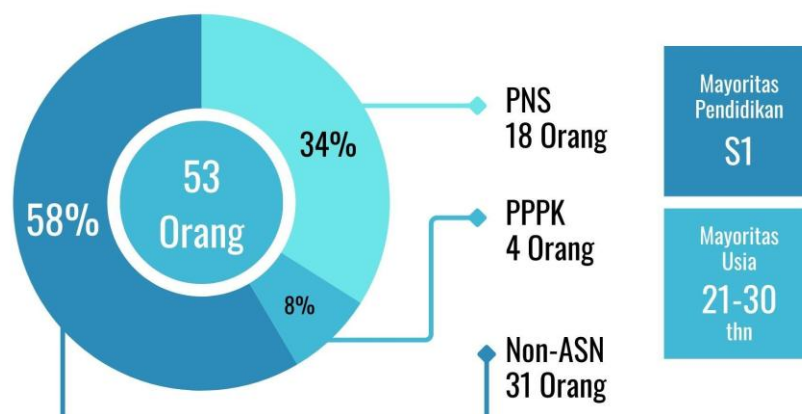
## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dasar pembentukan BPPP adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Sejak tahun 2022 BPPP dipimpin oleh Dr. Rahmawati, M.Ed. BPPP lahir sebagai salah satu wujud transformasi kelembagaan di lingkungan Kemendikburistek, khususnya mengoptimalkan tata kelola seleksi masuk perguruan tinggi yang sebelumnya diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) serta pelayanan pengujian kepada masyarakat yang dilakukan secara terbatas oleh Pusat Asesmen Pendidikan.

Jumlah SDM BPPP pada tahun 2024 sebanyak 53 orang yang terdiri atas 18 PNS, 4 PPPK dan 31 non-ASN, dengan mayoritas pendidikan dari pegawai adalah S1 dari berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan rentang usianya, sebagian besar didominasi pada rentang usia 21-30 tahun. BPPP mempunyai wilayah kerja di bidang pengelolaan pengujian pendidikan.



Gambar 4. Kondisi SDM BPPP tahun 2024

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
15. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1109/MK.05/2024 Tanggal 1 Desember 2024 Tentang Penetapan Kembali Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

### **C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

#### **Tugas**

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 44 tahun 2022, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Adapun tugas Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan adalah “Melaksanakan Pengelolaan Pengujian Pendidikan”.

#### **Fungsi**

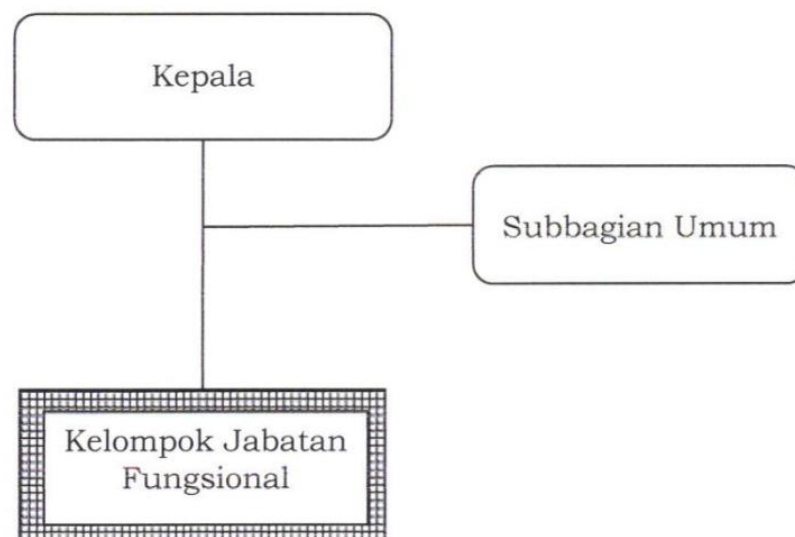
Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyusunan teknik dan metode pengujian di bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan layanan pengujian di bidang pendidikan;
4. Pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan kemitraan pengujian di bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

### Struktur Organisasi

Sebagai upaya untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi dapat terselenggara dengan baik, ditetapkan struktur organisasi BPPP yang terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 5. Permendikbudristek No. 44 Tahun 2022 Tentang OTK BPPP

#### D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP pada tahun 2024 ini terdapat beberapa isu strategis dan permasalahan yang menjadi perhatian, antara lain:

*Tabel 1. Isu dan Peran Strategis BPPP*

| Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peran Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah proses seleksi yang sangat kompetitif dan berdampak pada jalan karir individu peserta didik. oleh karena itu layanan pengujian yang berkualitas, kredibel dan akuntabel menjadi mutlak untuk memastikan tidak ada keterlambatan, kesalahan, bias, maupun kecurangan.                                                                                                                              | 1. BPPP diberikan amanah untuk mengawal transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN, meliputi target pengujian yang menggabungkan program sarjana dengan diploma. Transformasi lainnya adalah substansi pengujian yang bersifat holistik dan lebih mengukur kepada penalaran dibandingkan dengan pengetahuan. Transformasi ketiga adalah semangat memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan karir pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya. |
| 2. Seleksi masuk PTN dikenakan tarif kepada masyarakat. Dana PNPB yang terkumpul setiap tahunnya berjumlah besar. Tata kelola anggaran perlu dipastikan efisien dan efektif, dan dikelola seoptimal mungkin untuk peningkatan layanan.                                                                                                                                                                                                                 | 2. BPPP dibentuk dengan tujuan melaksanakan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, efisien dan efektif. Temuan BPK berulang terhadap kepanitiaan nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2019-2021 merekomendasikan dibentuknya satuan kerja yang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran. sehingga penggunaan anggaran lebih terpantau dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.                                                                      |
| 3. Penuntasan sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan (guru tertentu) merupakan kebijakan yang perlu menyeimbangkan antara kualitas guru dengan kelayakan penghasilan guru. Oleh karena itu layanan pengujian kelulusan program PPG guru tertentu perlu menitikberatkan pada pengukuran kompetensi yang relevan bagi guru yang sudah mengajar dengan pengalaman bertahun-tahun dan dikaitkan dengan program pengembangan profesi berkelanjutan. | 3. BPPP bersama panitia nasional Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru memformulasikan profil lulusan PPG dalam jabatan yang mengedepankan pengukuran kemampuan pedagogik. Kompetensi profesional berupa pengetahuan substansi dikuatkan melalui berbagai program sebagai bagian dari pengembangan profesi berkelanjutan.                                                                                                                            |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung upaya Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini diwujudkan melalui penciptaan Pelajar Pancasila yang memiliki karakter bernalar kritis, kreatif, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar ini juga diharapkan memiliki akhlak mulia, semangat gotong royong, dan mampu menjunjung tinggi kebhinekaan global.

Salah satu peran penting Kemendikbudristek adalah melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) yang memiliki visi untuk menjadi lembaga unggul dalam bidang pengujian pendidikan. Visi ini menekankan kredibilitas dan integritas dalam pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendidikan di Indonesia terus berkembang sesuai dengan standar yang diinginkan, mendukung pencapaian Pelajar Pancasila yang dapat bersaing di dunia global.

Dengan demikian, Kemendikbudristek berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman dengan penuh tanggung jawab.

#### Matriks Kinerja

Sasaran kegiatan BPPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Asesmen Pendidikan memiliki dua Sasaran Kegiatan (SK) dan masing-masing sasaran tersebut diukur melalui satu atau beberapa parameter/indikator pengukuran, yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada level IKK ini, capaian output secara dievaluasi secara berkala dan dilaporkan dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN) Kemendikbudristek. Guna mengukur ketercapaian Rencana Strategis BPPP, maka dibuat turunan dari perencanaan kinerja lima tahunan ke dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahunan. Berikut matriks Perjanjian Kinerja BPPP pada kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. Matriks Perjanjian Kinerja BPPP 2020-2024

| Kode    | Sasaran Kegiatan/ Indikator                                                            | Satuan   | Target Renstra 2020-2024 |                                                              |               |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|         |                                                                                        |          | 2020-2021                | Sep 2022                                                     | 2023          | 2024   |
| IKK 1.1 | Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | Lembaga  | Satker belum berdiri     | Satker baru berdiri, namun belum dilakukan penilaian kinerja | 119           | 14.180 |
| IKK 1.2 | Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | Dokumen  |                          |                                                              | 1             | 2      |
| IKK 2.1 | Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | Predikat |                          |                                                              | Belum dinilai | A      |
| IKK 2.2 | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | Nilai    |                          |                                                              | 90,00         | 95,69  |

## B. Program Prioritas

### Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan

Rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen merupakan dokumen rekomendasi kebijakan terhadap hasil asesmen terstandar yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Ruang lingkup sasaran meliputi hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), hasil Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG), hasil Asesmen Bakat Minat (ABM) Kelas XII, dan hasil pengujian lainnya. Rekomendasi bahan kebijakan disusun berlandaskan bukti yang diperoleh melalui pengukuran menggunakan asesmen terstandar, yang mencakup berbagai wilayah dan jenjang pendidikan di Indonesia. Adapun dampak yang diharapkan pada rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen ini adalah pemanfaatannya dalam perbaikan pembelajaran serta pertimbangan penerimaan peserta seleksi.

## Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan tugas BPPP berupa pengelolaan pengujian pendidikan, BPPP mempunyai visi “Unggul dalam Bidang Pengujian Pendidikan yang Kredibel dan Berintegritas”.

Untuk mencapai visi tersebut, BPPP menetapkan misi sebagai berikut.

1. Melaksanakan pengujian (tes) yang kredibel untuk uji kompetensi dan seleksi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan pengujian (tes) yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
3. Melakukan pengolahan, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian (tes) secara objektif.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengujian (tes) melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Dengan merujuk pada fokus pelayanan prima dan visi serta misi tersebut maka prinsip kerja yang diukung BPPP dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kewajaran.



Gambar 6. Layanan Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani

Tabel 3. Program Prioritas BPPP

| Program Prioritas                           | Target 2024     | Alokasi Anggaran 2024 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan    | 2 Rekomendasi   | 5.852.595.000         |
| Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani | 1.495.000 orang | 303.137.236.000       |

### C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran, BPPP menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada Laporan Kinerja 2024 yang merupakan tahun akhir periode Renstra 2020-2024, maka akan disajikan juga tren alokasi anggaran pada kurun waktu 2020-2024. Namun mengingat Satker BPPP baru berdiri pada akhir 2022, maka yang akan disajikan pada matriks berikut ini adalah alokasi anggaran pada kurun waktu 2023-2024.

Adapun rencana kerja dan alokasi anggaran BPPP tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran BPPP Tahun 2023 dan 2024

| KODE   | SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN                    | SATUAN                | DIPA 2023 |                 | DIPA 2024 |                 |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|        |                                                            |                       | TARGET    | PAGU            | TARGET    | PAGU            |
| 690632 | Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                     |                       |           | 206.635.841.000 |           | 318.842.584.000 |
| DI     | Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran               |                       |           | 200.000.000.000 |           | 308.989,831,000 |
| 2029   | Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan                    |                       |           | 200.000.000.000 |           | 308,989,831,000 |
| PBH    | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan          |                       |           | 5.320.540.000   |           | 5,852,595,000   |
| 001    | Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan                   | Rekomendasi Kebijakan | 1         | 5.320.540.000   | 1         | 5,852,595,000   |
| 057    | Hasil Kebijakan Pelaksanaan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi |                       |           | 5.320.540.000   |           | 5,852,595,000   |

|      |                                                                                                             |         |           |                 |           |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| QAA  | Pelayanan Publik kepada masyarakat                                                                          |         |           | 194.679.460.000 |           | 303,137,236,000 |
| 001  | Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani                                                                 | Orang   | 1.470.000 | 194.679.460.000 | 1.495.000 | 303,137,236,000 |
| 051  | Persiapan Ujian Seleksi                                                                                     |         |           | 23.346.723.000  |           | 33,302,451,000  |
| 052  | Pelaksanaan Ujian Seleksi                                                                                   |         |           | 167.986.655.000 |           | 265,751,020,000 |
| 053  | Koordinasi dan Kerja Sama dengan Mitra Lembaga                                                              |         |           | 3.346.082.000   |           | 4,083,765,000   |
| WA   | Program Dukungan Manajemen                                                                                  |         |           | 6.635.841.000   |           | 9,852,753,000   |
| 2032 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud |         |           | 6.635.841.000   |           | 9,852,753,000   |
| EBA  | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                                         |         |           | 6.635.841.000   |           | 9,852,753,000   |
| 962  | Layanan Umum                                                                                                | Layanan | 1         | 1.000.000.000   | 1         | 1,000,000,000   |
| 065  | Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Satker                                           |         |           | 325.506.000     |           | 344,940,000     |
| 066  | Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan satker                                                              |         |           | 338.556.000     |           | 339,315,000     |
| 067  | Pengelolaan kepegawaian Satker                                                                              |         |           | 217.138.000     |           | 229,745,000     |
| 068  | Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan satker                                              |         |           | 118.800.000     |           | 86,000,000      |
| 994  | Layanan Perkantoran                                                                                         | Layanan | 1         | 5.635.841.000   | 1         | 8,852,753,000   |
| 001  | Gaji dan Tunjangan                                                                                          |         |           | 3.635.841.000   |           | 3,999,426,000   |
| 002  | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                                         |         |           | 2.000.000.000   |           | 4,853,327,000   |

#### D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Renstra Pusat Asesmen Pendidikan 2020-2024, BPPP menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun Renstra sebagai berikut. Perlu diketahui bahwasanya sebagai UPT Pusat

Asesmen Pendidikan, BPPP tidak menentukan target Renstra tersendiri, melainkan menginduk ke target Renstra Pusat Asesmen Pendidikan. Target kinerja BPPP hanya tertuang dalam target Perjanjian Kinerja (PK) tiap tahunnya. Berikut ini gambaran target Renstra dan target PK BPPP dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel 5. Target Renstra dan Target PK BPPP 2020-2024

| Tahun            | Sasaran Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                       | Satuan   | Target Renstra | Target PK     | %   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----|
| <b>2020-2022</b> | Belum dilakukan penilaian kinerja bagi Satker BPPP yang baru berdiri pada akhir 2022                                      |                                                                                                  |          |                |               |     |
| <b>2023</b>      | SK 1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | Lembaga  | 119            | 119           | 100 |
|                  |                                                                                                                           | [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | Dokumen  | 1              | 1             | 100 |
|                  | SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                     | [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | Predikat | belum dinilai  | belum dinilai | -   |
|                  |                                                                                                                           | [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | Nilai    | 90             | 90            | 100 |
| <b>2024</b>      | SK 1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | Lembaga  | 14.180         | 14.180        | 100 |
|                  |                                                                                                                           | [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | Dokumen  | 2              | 2             | 100 |

|  |                                                                       |                                                                                                  |          |       |       |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|
|  | SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | Predikat | A     | A     | 100 |
|  |                                                                       | [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | Nilai    | 95,69 | 95,69 | 100 |

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPPP menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Terkait IKK Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas pada tahun 2024, terdapat perbedaan angka yang sangat tinggi antara target PK sebelumnya di tahun 2023 (119 lembaga) dengan target Perjanjian Kinerja atau PK (14.180 lembaga). Perumusan target PK 2024 ini telah diputuskan berdasarkan evaluasi dan analisis pelaksanaan Asesmen Bakat Minat (ABM) pada 2023. Perlu diketahui bahwasanya pada pertengahan tahun 2023 tersebut, BPPP diberikan amanah untuk melaksanakan Asesmen Bakat Minat (ABM) kelas XII di 13.356 satuan pendidikan tanpa dipungut biaya. Pencapaian tahun 2023 inilah yang kemudian dijadikan pemantik bagi BPPP dalam memberikan layanan pengujian non berbayar terhadap satuan pendidikan, dengan memasukkan angka target satuan pendidikan pelaksana Asesmen Bakat Minat kelas XII pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, BPPP diberikan alokasi anggaran sebesar Rp318.842.584.000. Setelah dilakukan revisi terakhir pada tanggal 27 Desember 2024 dengan nomor Revisi DIPA: SP DIPA-023.11.2.690632/2024, besaran anggaran menjadi Rp439.515.548.000. Anggaran tersebut dialokasikan dalam kegiatan “Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan” sebesar Rp430.686.670.000 dan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar,

Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud” sebesar Rp8.828.878.000. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pengujian pendidikan dalam bentuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Asesmen Bakat dan Minat (ABM), Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG), serta kegiatan pengujian pendidikan lainnya.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja (Awal)

| Sasaran Kegiatan (SK)                                                                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                                 | Target IKK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SK 1.<br>Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | 14.180     |
|                                                                                                                              | [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | 2          |
| SK 2.<br>Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                     | [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | A          |
|                                                                                                                              | [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | 95,69      |

| Kode           | Nama Kegiatan                                                                                               | Alokasi           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2029           | Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan                                                                     | Rp308.989.831.000 |
| 2032           | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud | Rp9.852.753.000   |
| Total Anggaran |                                                                                                             | Rp318.842.584.000 |

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (Revisi)

| Sasaran Kegiatan (SK)                                                                                      | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                         | Target IKK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SK 1.<br>Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada | [IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas | 14.180     |
|                                                                                                            | [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                   | 2          |

|                                                                                |                                                                                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| bidang pendidikan                                                              |                                                                                                                                                                         |                |
| SK 2.<br>Meningkatnya tata kelola Balai<br>Pengelolaan Pengujian<br>Pendidikan | [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan<br><br>[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | A<br><br>95,69 |

| Kode           | Nama Kegiatan                                                                                               | Alokasi           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2029           | Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan                                                                     | Rp430.686.670.000 |
| 2032           | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud | Rp8.828.878.000   |
| Total Anggaran |                                                                                                             | Rp439.515.548.000 |

Pada tahun 2024, BPPP melakukan penyesuaian anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan volume pelaksanaan pengujian pendidikan khususnya pada Pelaksanaan UKPPPG sebagai implementasi percepatan penuntasan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan (guru tertentu). Berikut ini penyesuaian anggaran sesuai Perjanjian Kinerja 2024 (PK awal dan PK revisi).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, BPPP menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 8. Pengukuran Kinerja BPPP Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                       | Satuan   | Target | Realisasi | %     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------|
| 1  | SK 1.<br>Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | Lembaga  | 14.180 | 14.577    | 102,8 |
|    |                                                                                                                              | [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | Dokumen  | 2      | 2         | 100   |
| 2  | SK 2.<br>Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                     | [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | Predikat | A      | BB        | 90,2  |
|    |                                                                                                                              | [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | Nilai    | 95,69  | 97,41     | 101,8 |

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, BPPP diberikan alokasi anggaran sebesar Rp318.842.584.000,-. Setelah dilakukan revisi terakhir pada tanggal 27 Desember 2024 dengan nomor Revisi DIPA: SP DIPA-023.11.2.690632/2024, besaran anggaran menjadi Rp 439.515.548.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan dalam kegiatan “Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan” sebesar Rp 430.686.670.000,- dan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar,

Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek” sebesar Rp8.828.878.000,-. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pengujian pendidikan dalam bentuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Asesmen Bakat dan Minat (ABM), Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG), serta kegiatan pengujian pendidikan lainnya.

### **Kegiatan Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan**

Kegiatan Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan bertujuan untuk menyediakan informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan guna mendukung sasaran kegiatan tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan. Sasaran kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut.

IKK 1.1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas, dengan target 14.180 lembaga

IKK 1.2. Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen, dengan target 2 dokumen.

Target output untuk IKK 1.1. dan IKK 1.2. dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, dengan target sebagaimana tertera dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada lampiran 1. Untuk mencapai kegiatan Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan yang dilaksanakan di BPPP pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp430.686.670.000,-. Anggaran tersebut ditujukan untuk pencapaian kegiatan melalui 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu. (a) Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani [RO-1] dengan anggaran Rp424.834.075.000,-, dan (b) Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan [RO-2] dengan alokasi anggaran Rp5.852.595.000,-.

### **IKK 1.1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas**

IKK ini terkait dengan perhitungan jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pengujian pendidikan di bawah koordinasi BPPP. Dalam menghitung jumlah sasaran outputnya, diperlukan adanya definisi operasional yang melekat pada objek pengukuran, agar menghindari ambiguitas atau multitafsir dari sisi cara menghitung. Berikut ini definisi operasional IKK ini, yang merujuk pada definisi operasional Renstra Pusat Asesmen Pendidikan.

*Tabel 9. Definisi Operasional IKK*

| IKK 1.1              | Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi Operasional | <p>Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas meliputi satuan pendidikan pada seluruh jenjang (anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi), meliputi PAUD, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, serta Perguruan Tinggi yang mampu menerapkan asesmen berbasis komputer.</p> <p>Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas adalah satuan pendidikan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdaftar dalam sistem pendataan satuan pendidikan pelaksana asesmen berbasis komputer.</li><li>• Mengikuti tahapan persiapan teknis pelaksanaan asesmen berbasis komputer.</li><li>• Melaksanakan asesmen berbasis komputer sesuai dengan prosedur operasional standar.</li><li>• Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).</li></ul> |
| Cara Perhitungan     | Hitung Satuan Pendidikan (baik jenjang dasar, menengah, maupun tinggi) yang melaksanakan pengujian pendidikan terstandar yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Adapun capaian output BPPP dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terkait IKK satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas dapat dijabarkan berdasarkan klasifikasi produk layanan sebagai berikut.

Tabel 10. Klasifikasi Produk Layanan

| No           | Nama Layanan Pengujian                             | Realisasi Jumlah Satuan Pendidikan (2020-2022)                              | Realisasi Jumlah Satuan Pendidikan (2023) | Realisasi Jumlah Satuan Pendidikan (2024) |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1            | Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) | Belum dilakukan pengukuran, karena Satker BPPP baru berdiri pada akhir 2022 | 119                                       | 120                                       |
| 2            | Asesmen Bakat Minat (ABM)                          |                                                                             | 13.356*)                                  | 14.399                                    |
| 3            | Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG)    |                                                                             | 122                                       | 133**)                                    |
| 4            | Kegiatan pengujian Pendidikan lainnya              |                                                                             | 6                                         | 7                                         |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | -                                                                           | <b>247</b>                                | <b>14.577</b>                             |

\*) Preliminary Study ABM, tidak dihitung dalam target Perjanjian Kinerja 2023

\*\*\*) Dalam perhitungan ini, total satuan pendidikan yang mengikuti lebih dari satu layanan akan dihitung satu kali, sehingga capaian target yang dilaporkan adalah **51 satuan pendidikan**

Pemenuhan target jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas pada masing-masing tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2023, faktor utama yang mendukung tercapainya jumlah tersebut adalah dukungan dari sistem pengujian yang telah dimiliki oleh BPPP sehingga data yang dihasilkan mampu diolah secara langsung karena sudah terintegrasi di dalam environment sistem BPPP. Sistem pengujian ini mampu memaksimalkan kapasitas volume beban pengujian yang dilaksanakan dengan skala nasional. Selain faktor tersebut, pada pertengahan tahun 2023, BPPP juga diberikan amanah untuk melaksanakan pengujian terstandar dalam rangka sertifikasi pendidik pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikoordinasi oleh Direktorat PPG, Dirjen GTK Kemendikbudristek. Dalam kaitannya dengan program strategis pemerintah

untuk menuntaskan sertifikasi guru, sistem pengujian BPPP telah diyakini mampu dan teruji untuk melaksanakan pengujian berskala nasional dengan berbasis lokasi TUK.

Penambahan tugas di pertengahan tahun 2023 ini berimplikasi pada meningkatnya capaian IKK jumlah satuan pendidikan yang semula ditargetkan **119** lembaga, menjadi **241** lembaga (persentase capaian **203%**). Pada pertengahan tahun 2023, BPPP juga diberikan amanah untuk melaksanakan studi awal pelaksanaan Asesmen Bakat Minat (ABM) kelas XII untuk memetakan potensi dan minat siswa. Pemetaan melalui ABM kelas XII ini selaras dengan proses bisnis BPPP dalam melaksanakan SNPMB, terutama dalam membantu mengidentifikasi sejauh mana linieritas antara peminatan jurusan pada jenjang Pendidikan tinggi dengan bukti empiris hasil pemetaan bakat dan minat siswa kelas XII. Pada pelaksanaan ABM kelas XII tahun 2023, BPPP berhasil memberikan layanan kepada **13.356** satuan pendidikan. Namun capaian ini tidak dicatatkan dalam perhitungan realisasi IKK, karena akan menimbulkan anomali yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan target PK yang ditetapkan. Selain itu, program ini merupakan studi/kajian awal yang mana di saat koordinasi penyusunan PK revisi di tingkat eselon 1, keberlanjutannya masih perlu pendalaman kembali.

Sebagai tindak lanjut terhadap capaian 2023 serta mempertimbangkan dampak positif dari pelaksanaan ABM kelas XII tahun 2023, maka pada perumusan PK tahun 2024, target IKK satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas telah disesuaikan dengan memasukkan juga target jumlah satuan pendidikan yang akan melaksanakan ABM kelas XII. Selama kurun waktu 2024, target IKK sejumlah **14.180** lembaga telah tercapai dengan persentase **102,8%** pada angka **14.577** lembaga. Capaian ini diyakini masih dalam tahap terukur dan memiliki potensi bisa ditingkatkan, mengingat animo sekolah yang sangat tinggi untuk turut melaksanakan ABM. Berdasarkan umpan balik yang telah dihimpun, mayoritas sekolah sangat mendukung keberlanjutan ABM kelas XII ini agar siswa mendapat gambaran mengenai potensi bakat dan minatnya sedari awal sehingga lebih presisi dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Selain itu, potensi ketercapaian output ini juga diperkuat dengan faktor jejaring yang luas (bersama Pusat Asesmen Pendidikan) dengan Dinas

Pendidikan maupun Kanwil Kemenag di berbagai daerah yang telah teruji dalam melaksanakan ujian berskala nasional.

### **IKK 1.2. Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen**

IKK ini terkait dengan perhitungan jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan yang telah disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap hasil pengujian pendidikan di bawah koordinasi BPPP.. Selain melaksanakan pengujian, BPPP juga mengambil manfaat lebih jauh dan berdampak dengan melakukan analisis sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam menghitung jumlah sasaran outputnya, berikut ini dijabarkan definisi operasional terkait IKK jumlah rekomendasi ini, yang merujuk pada definisi operasional Renstra Pusat Asesmen Pendidikan 2020-2024.

*Tabel 11. Definisi Operasional Renstra Pusat Asesmen Pendidikan 2020-2024*

| IKK 1.2              | Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi Operasional | <p>Rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen merupakan dokumen rekomendasi kebijakan terhadap hasil asesmen terstandar yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Ruang lingkup sasaran meliputi hasil asesmen kompetensi minimum, hasil survei karakter, hasil survei lingkungan belajar; hasil survei nasional dan internasional; serta hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Rekomendasi bahan kebijakan disusun berlandaskan bukti yang diperoleh melalui pengukuran menggunakan asesmen terstandar, yang mencakup berbagai wilayah dan jenjang pendidikan di Indonesia.</p> <p>Rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen ini digunakan untuk perbaikan pembelajaran dan pertimbangan penerimaan peserta seleksi.</p> |
| Cara Perhitungan     | Hitung jumlah dokumen rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil asesmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Pada periode Renstra 2020-2024, BPPP baru menjalani 2 (dua) tahun dalam pemenuhan dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen. Berikut ini matriks realisasi target berupa jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen.

*Tabel 12. Matriks Realisasi Target*

| No            | Nama Dokumen Rekomendasi Kebijakan          | Realisasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan (2020-2022)                          | Realisasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan (2023) | Realisasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan (2024) |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | Rekomendasi kebijakan terkait SNPMB         | Belum dilakukan pengukuran, karena Satker BPPP baru berdiri pada akhir 2022 | 1                                             | 1                                             |
| 2             | Rekomendasi kebijakan terkait UKPPPG        |                                                                             | 1                                             | -                                             |
| 3             | Rekomendasi kebijakan terkait ABM Kelas XII |                                                                             | -                                             | 1                                             |
| <b>JUMLAH</b> |                                             |                                                                             | 2                                             | 2                                             |

Pada tahun 2023, BPPP menghasilkan 2 dokumen rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengujian, antara lain: 1) rekomendasi kebijakan SNPMB dan 2) rekomendasi kebijakan UKPPPG. Adapun pada 2024, dokumen yang dihasilkan adalah rekomendasi kebijakan SNPMB dan ABM Kelas XII. Pemenuhan target 2 dokumen pada masing-masing tahun 2023 dan 2024 dapat dipenuhi dengan baik. Faktor utama yang mendukung tercapainya 2 dokumen tersebut adalah dukungan dari sistem pengujian yang telah dimiliki oleh BPPP sehingga data yang dihasilkan mampu diolah secara langsung karena sudah terintegrasi di dalam environment sistem BPPP. Selain itu, dukungan dari kualitas SDM penilaian pendidikan serta peran aktif pimpinan BPPP dalam mengawal proses analisis hasil pengujian juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas dokumen dan penyelesaian dokumen tepat waktu.

Selaras dengan target IKK Renstra rekomendasi bahan kebijakan hasil asesmen yang dihasilkan Pusat Asesmen Pendidikan sebagai acuan BPPP, dalam kurun waktu Renstra 2020-2024, target yang

dicanangkan BPPP adalah 2 dokumen per tahun (2023 dan 2024). Target 2 dokumen ini diyakini cukup terukur untuk dicapai, mengingat diversifikasi layanan pengujian BPPP untuk memenuhi kebutuhan pengujian yang relevan dengan kebutuhan jaman, berpotensi memberikan banyak pilihan kajian sebagai bahan rekomendasi kebijakan.

### **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek**

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud bertujuan untuk peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) guna mendukung capaian Indikator Kinerja Program Kemendikbudristek (IKP 5.3.10) berupa peningkatan predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Kinerja pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan serta Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Pada tahun 2024, IKK Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ditargetkan berpredikat **A**, sementara IKK "Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan" ditargetkan nilai sebesar **95,69** poin.

Untuk mencapai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek yang dilaksanakan di BPPP pada tahun 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.828.878.000,- yang dialokasikan melalui 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu (a) Layanan Umum [RO-1] dengan anggaran Rp 1.000.000.000,-, dan (b) Layanan Perkantoran [RO-2] dengan anggaran Rp 7.828.878.000,-

### IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Terkait predikat SAKIP BPPP tahun 2024 sebagai tahun pertama penilaian setelah berdirinya Satker pada akhir tahun 2022, pada mulanya BPPP diproyeksikan mampu mencapai predikat A. Hal ini diyakini karena Satker BPPP memiliki modal awal potensial berupa tugas dan fungsi layanan pengujian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memberikan dampak besar terutama terkait pengembangan karir individu (misalnya seleksi mahasiswa baru, seleksi penerima beasiswa, sertifikasi pendidik, dan sebagainya). Pendekatan melalui pengukuran predikat SAKIP dengan target yang cukup tinggi diyakini mampu memantik kinerja Satker dalam memberikan layanan prima, meskipun masih pada tahun pertama penilaian.

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, predikat SAKIP untuk Satker yang baru pertama kalinya dinilai adalah (paling tinggi) berpredikat **BB**. Salah satu komponen utama penilaian SAKIP adalah adanya komparasi dengan capaian predikat SAKIP tahun sebelumnya, sehingga terdapat beberapa komponen yang belum tersedia untuk dinilai. Komparasi capaian SAKIP dengan capaian tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi Satker dalam mengimplementasikan program berbasis kinerja lintas tahun.

Dengan capaian predikat SAKIP BPPP tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi pelecut semangat bagi BPPP dalam meningkatkan kualitas kinerjanya pada tahun selanjutnya.

### IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Indikator kinerja ini mengukur perolehan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang dilaksanakan oleh BPPP. Adapun pengukuran indikator kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun capaian perolehan Nilai Kinerja

Anggaran (NKA) BPPP pada tahun 2024 sebesar 95.69 poin atau setara dengan 106,32% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Realisasi capaian tersebut didukung dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.324.253.304,- atau setara dengan 87,57% dari pagu DIPA sebesar Rp. 6.080.000.000,-.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain.

- 1) Proses pencatatan penerimaan, pengesahan pendapatan dan pengesahan pengeluaran PNPB yang masih dilakukan secara manual.
- 2) Jumlah kontrak kerja sama dengan mitra pelaksana layanan yang sangat banyak.
- 3) Pembuatan kontrak baru untuk setiap periode ujian, hal ini menyebabkan volume verifikasi dan validasi dokumen kontrak yang sangat banyak.
- 4) Target penuntasan sertifikasi Guru Tertentu, menyebabkan padatnya waktu pelaksanaan UKPPPG dan dengan target peserta yang bertambah dari tahun 2023.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1) Rencana perjanjian kerja sama yang telah dipersiapkan pada pertengahan Desember di tahun sebelumnya, sehingga pada bulan Januari sudah siap ditandatangani dan tidak terkendala saat pengajuan pencairan dana.
- 2) Sistem pencatatan pendapatan dan pengeluaran BLU masih dilakukan secara manual sehingga belum tersedia dashboard yang menyajikan data secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tahun 2024 telah dilakukan *benchmark* dan mengadopsi sistem keuangan yang sudah teruji dan handal, modern serta terintegrasi dalam pengelolaan keuangan bersumber dana BLU. Harapannya pada tahun 2025, sudah dapat implementasi pencatatan dan pelaporan keuangan BLU secara terintegrasi.
- 3) Penyederhanaan mekanisme kontrak swakelola, dengan membuat satu kontrak induk di awal periode, untuk mengakomodir berbagai produk layanan pengujian dalam satu tahun periode

kontrak, seperti contoh pada kontrak Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yang direncanakan di tahun 2024 akan dilakukan sebanyak 4 tahap pelaksanaan, tetapi kontrak yang akan dipersiapkan langsung dalam 1 tahun periode, sementara pencairan setiap tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan timeline dan periode anggaran.

## **B. Realisasi Program/Agenda Prioritas**

### **1) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)**

Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) merupakan salah satu tugas utama yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Pelaksanaan SNPMB dilakukan dengan dukungan dari Tim Pelaksana SNPMB, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk memastikan seleksi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

BPPP bersama Tim Pelaksana SNPMB bertugas untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses seleksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tugas utama yang diemban dalam penyelenggaraan SNPMB mencakup:

- a. Pengelolaan Data dan Registrasi.
  - Mengelola PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) untuk SNBP.
  - Integrasi data dengan Dapodik, EMIS, BAN-SM.
  - Memastikan keakuratan data sekolah dan siswa.
  - Registrasi akun siswa untuk SNBP dan SNBT.
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan Seleksi.
  - Pemeringkatan nilai rapor untuk SNBP.
  - Pengembangan dan pengelolaan soal UTBK (TPS & Literasi).
  - Pelaksanaan UTBK berbasis komputer dengan pengawasan ketat.

c. Sosialisasi dan Layanan Informasi.

- Penyebaran informasi melalui website, media sosial, leaflet, dan konferensi pers.
- Layanan Helpdesk dan Call Center untuk membantu pendaftaran.
- Koordinasi dengan sekolah dan PTN.

d. Penjaminan Mutu dan Evaluasi.

- Monitoring seluruh tahapan SNBP & SNBT.
- Identifikasi kendala seperti kesalahan data NISN dan rapor.
- Perbaiki sistem seleksi berdasarkan hasil evaluasi.

e. Pengelolaan Infrastruktur dan Aksesibilitas.

- Kesiapan infrastruktur IT untuk pendaftaran dan ujian.
- Fasilitas aksesibilitas bagi peserta difabel.
- Keamanan sistem untuk mencegah kecurangan.

SNPMB terdiri dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang bertujuan untuk menjaring dan menyeleksi calon mahasiswa baru yang memiliki kualitas akademik unggul serta memiliki potensi untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Seleksi ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh peserta tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, suku, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Melalui SNBP dan SNBT, setiap calon mahasiswa diberikan peluang yang luas dan fleksibel untuk memilih program studi di berbagai jenis perguruan tinggi, baik PTN Akademik, PTN Vokasi, maupun PTKIN, dengan kebebasan untuk memilih lintas wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta dalam mengejar pendidikan tinggi sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya, tanpa terhalang oleh batasan geografis atau latar belakang sosial ekonomi.

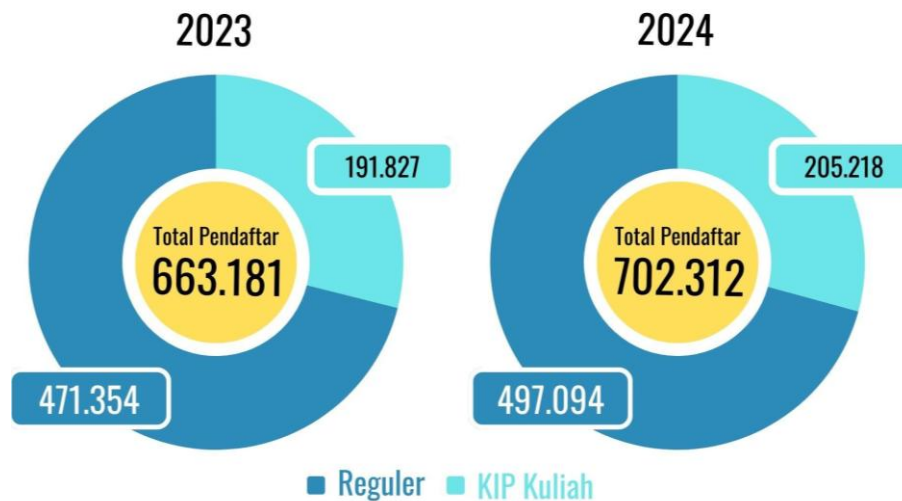
Dengan demikian, SNBP dan SNBT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi berbasis prestasi dan kemampuan akademik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **A) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)**

SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prestasi akademik dan prestasi lainnya. Jalur ini diselenggarakan secara terintegrasi oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dan PTN Vokasi di Indonesia, dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu dalam setiap tahapan seleksi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses penerimaan mahasiswa. Penilaian dalam SNBP dilakukan berdasarkan:

1. Nilai akademik, yang diperoleh dari hasil belajar siswa selama jenjang pendidikan menengah.
2. Kombinasi nilai akademik dan prestasi lainnya, seperti prestasi bidang olahraga, seni, maupun kejuaraan akademik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.

SNBP bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus melalui ujian tertulis, sehingga siswa dapat fokus pada pencapaian akademik selama masa studi di sekolah. Pembiayaan pelaksanaan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah, menggunakan anggaran dari sumber dana Rupiah Murni (RM), sehingga peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran, yang bertujuan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh calon mahasiswa tanpa terkendala faktor ekonomi.



Gambar 7. Jumlah Peserta SNBP 2023 dan 2024

Pada pelaksanaan SNBP tahun 2024 mengalami kenaikan, yang pada tahun 2023 pendaftar SNBP tercatat sebanyak 663.181 peserta menjadi 702.312 peserta pada tahun 2024.

## B) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

SNBT merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes (UTBK) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh PTN bersangkutan. SNBT diselenggarakan oleh seluruh PTN Akademik dan PTN Vokasi dari seluruh Indonesia, secara terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT dilakukan sebelum dan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas. Tahapan SNBT meliputi pengembangan tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, penyediaan dokumen ujian, pelaksanaan UTBK, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan monitoring, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta pengkajian dan pengembangan.

Pembiayaan pelaksanaan SNBT menggunakan dana Rupiah Murni dan dana masyarakat. Tarif UTBK-SNBT sebesar Rp 200.000,- tertuang dalam PMK No.4/PMK.02/2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan SNPMB PTN yang Berlaku pada Kemendikbudristek yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2024. Selain itu, pelaksanaan ini juga

diperuntukan bagi pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sesuai dengan pasal 2, besaran tarif seleksi nasional berdasarkan tes untuk perguruan tinggi negeri program diploma/ sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), bagi pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan/atau menerima program bantuan sosial, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

SNBT dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon mahasiswa di Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, melalui sistem seleksi yang transparan, adil, dan diawasi secara ketat. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerimaan mahasiswa baru berjalan sesuai standar mutu dan mencerminkan asas inklusivitas pendidikan.



Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT dalam peta Indonesia

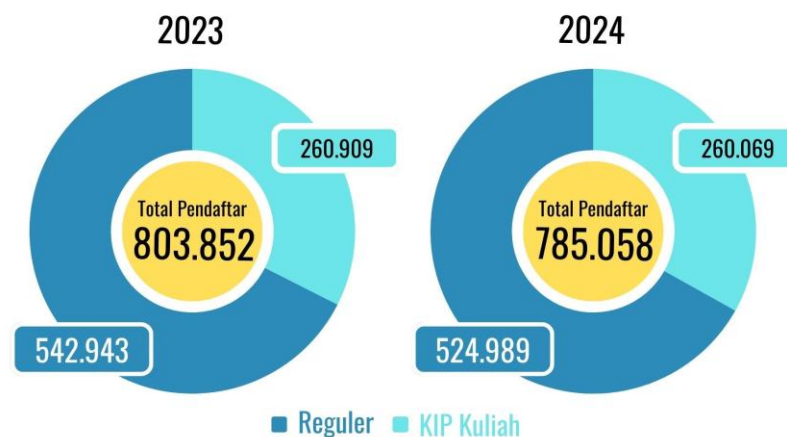
| No | Nama PTN                            | No | Nama PTN                           |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1  | UNIVERSITAS INDONESIA               | 21 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG        |
| 2  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET           | 22 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG          |
| 3  | UNIVERSITAS BRAWIJAYA               | 23 | UNIVERSITAS LAMPUNG                |
| 4  | UNIVERSITAS DIPONEGORO              | 24 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG         |
| 5  | UNIVERSITAS PADJADJARAN             | 25 | UNIVERSITAS JEMBER                 |
| 6  | UNIVERSITAS NEGERI PADANG           | 26 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR        |
| 7  | UNIVERSITAS ANDALAS                 | 27 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA            |
| 8  | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA          | 28 | UNIVERSITAS UDAYANA                |
| 9  | UNIVERSITAS GADJAH MADA             | 29 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA            |
| 10 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA    | 30 | UNIVERSITAS MULAWARMAN             |
| 11 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 31 | UNIVERSITAS RIAU                   |
| 12 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA         | 32 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA              |
| 13 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA       | 33 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN           |
| 14 | UNIVERSITAS HASANUDDIN              | 34 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA |
| 15 | UNIVERSITAS AIRLANGGA               | 35 | UNIVERSITAS JAMBI                  |
| 16 | UPN VETERAN JAKARTA                 | 36 | UPN VETERAN JAWA TIMUR             |
| 17 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR            | 37 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT      |
| 18 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO        | 38 | UNIVERSITAS MATARAM                |
| 19 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA          | 39 | UNIVERSITAS HALUOLEO               |
| 20 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN      | 40 | UNIVERSITAS BENGKULU               |

| No | Nama PTN                            |
|----|-------------------------------------|
| 41 | UNIVERSITAS SILIWANGI               |
| 42 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG |
| 43 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA         |
| 44 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA            |
| 45 | UNIVERSITAS TADULAKO                |
| 46 | UPN VETERAN YOGYAKARTA              |
| 47 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH            |
| 48 | UNIVERSITAS TIDAR                   |
| 49 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA        |
| 50 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA            |
| 51 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI           |
| 52 | ISI YOGYAKARTA                      |
| 53 | UNIVERSITAS SAMUDRA                 |
| 54 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA      |
| 55 | ISI - DENPASAR                      |
| 56 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG         |
| 57 | ISBI BANDUNG                        |
| 58 | ISI SURAKARTA                       |
| 59 | INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN       |
| 60 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN          |

| No                 | Nama PTN                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 61                 | UNIVERSITAS PATTIMURA                         |
| 62                 | UNIVERSITAS KHAIRUN                           |
| 63                 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT                    |
| 64                 | ISI PADANG PANJANG                            |
| 65                 | UNIVERSITAS TEUKU UMAR                        |
| 66                 | ISBI ACEH                                     |
| 67                 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI             |
| 68                 | UNIVERSITAS TIMOR                             |
| 69                 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH                      |
| 70                 | ISBI TANAH PAPUA                              |
| 71                 | UNIVERSITAS PAPUA                             |
| 72                 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE                   |
| 73                 | UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER<br>KOLAKA |
| 74                 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO                     |
| <b>Grand Total</b> |                                               |

Gambar 8. Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT



Gambar 9. Jumlah Peserta SNBT 2023 dan 2024

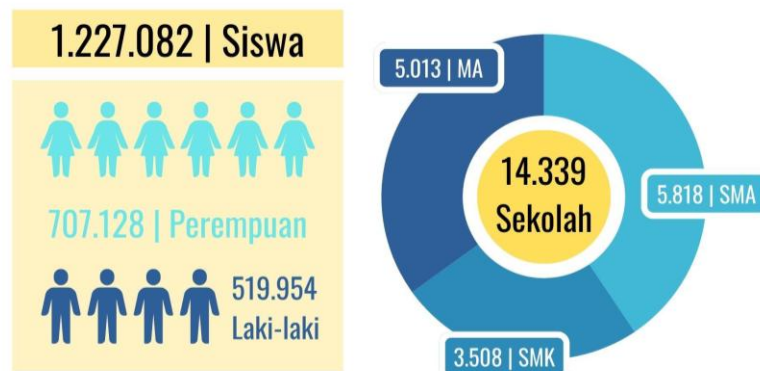
Pada pelaksanaan SNBT tahun 2024 peserta yang terdaftar sebagai peserta reguler sebanyak 524.989 peserta dan peserta KIP-Kuliah sebanyak 260.069 peserta yang ditetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

## 2) Asesmen Bakat dan Minat (ABM) Kelas XII

Asesmen Bakat dan Minat (ABM) merupakan asesmen untuk siswa kelas XII pada jenjang SMA sederajat, melalui moda CBT (Computer Based Test) dan juga mobile test (diakses melalui handphone). Aspek yang diukur dalam ABM terdiri atas tes bakat yang mencakup kemampuan verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanik, klerikal, dan penggunaan bahasa. Selain itu dalam ABM juga mengukur rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas (minat) pada siswa, yang meliputi minat dasar, minat

metodis, dan minat praktis. Terdapat delapan jenis minat dasar yang diukur pada ini, mencakup fasilitasi sosial, pengelolaan, detail bisnis, pengelolaan data, keteknikan, kerja lapangan, kesenian, dan menolong. ABM bertujuan memberikan informasi kepada siswa, sekolah, ataupun orang tua mengenai potensi siswa tersebut pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur sehingga diharapkan dapat membuat arah pengembangan dirinya secara lebih jelas dan terencana.

Hasil ABM dimaksudkan untuk memberikan *insight* kepada siswa agar dapat memprediksi kemampuannya untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi baru. Pelaksanaan ABM di 38 provinsi di seluruh Indonesia dilakukan dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah melalui sumber dana Rupiah Murni (RM). Adapun jumlah peserta dan jumlah sekolah yang melaksanakan ABM pada 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 10. Peserta Didik Kelas XII dan Satuan Pendidikan yang mendapatkan layanan Asesmen Bakat Minat

### 3) Seleksi Masuk dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG)

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sejak program sertifikasi guru dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 jumlah guru yang telah memiliki Sertifikat

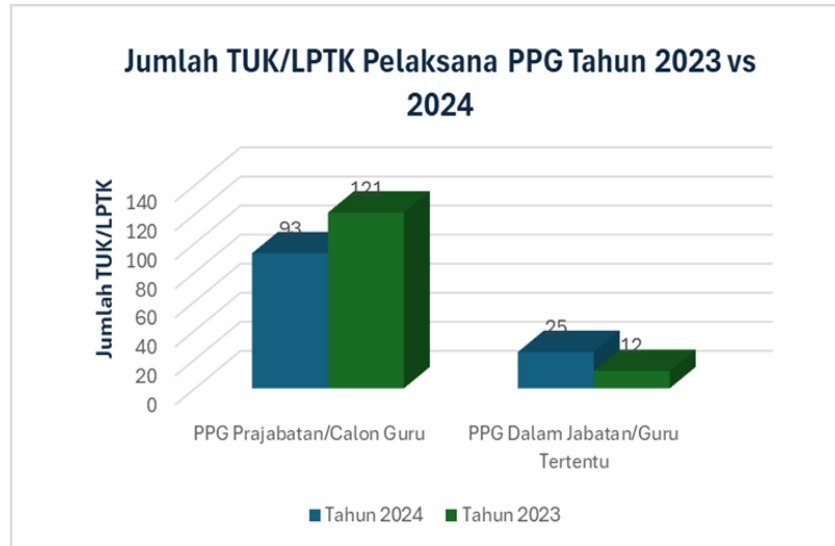
Pendidik sebanyak 1.275.486 guru dari 2.869.186 Guru (Dapodik 2021-2022). Artinya, masih ada sejumlah 1.593.700 guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

Salah satu upaya percepatan sertifikasi guru adalah melakukan fasilitasi terhadap lulusan perguruan tinggi yang akan mendaftar menjadi guru untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang selanjutnya disebut dengan PPG Calon Guru. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan PPG bagi guru aparatur sipil negara dan guru bukan aparatur sipil negara yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya program ini disebut dengan PPG Guru Tertentu. Jadi, program PPG Calon Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, baik dari kependidikan maupun non kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan PPG Guru Tertentu adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru yang sudah aktif mengajar pada satuan pendidikan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

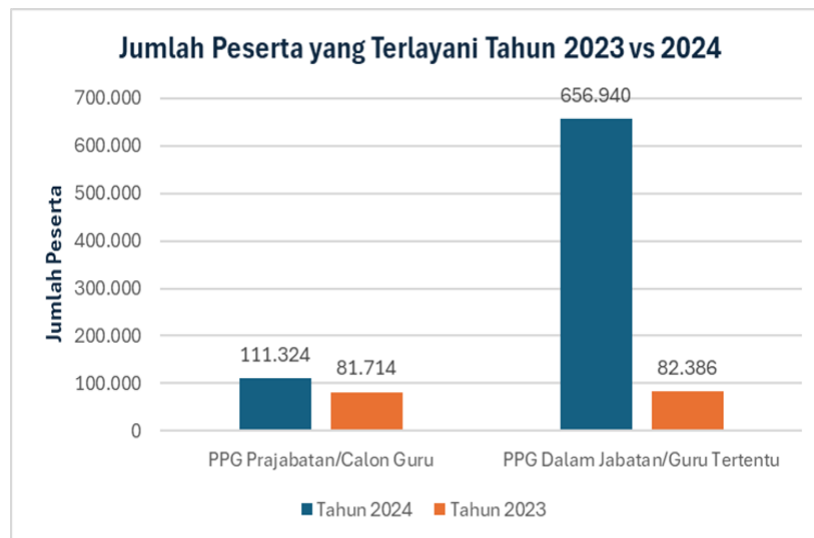
Pada tahun 2024 terdapat pembaruan aturan untuk pelaksanaan PPG dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Permendikbudristek tersebut mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru baik untuk Calon Guru maupun Guru Tertentu. Untuk pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru didukung dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 4560/B/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan PPG Guru Tertentu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru dan Peraturan Direktur

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru.

PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi untuk calon guru dan guru tertentu mendapatkan sertifikat pendidik. PPG Calon Guru diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yaitu: penerimaan calon peserta, pembelajaran, dan uji kompetensi peserta PPG. Untuk tahapan awal PPG Calon Guru, diselenggarakan seleksi masuk bagi peserta PPG dengan melibatkan berbagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terdiri atas sekolah dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Seleksi masuk PPG ini dilaksanakan melalui seleksi nasional. Program ini dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu. Dalam PP 74 tahun 2008 yang disempurnakan dengan PP No.19 Tahun 2017, pasal 9 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang terdiri atas uji tertulis dan uji kinerja. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, para mahasiswa PPG harus lulus dari ujian kompetensi tersebut. Selanjutnya program ini disebut dengan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).



Gambar 11. Rekapitulasi Jumlah TUK/LPTK Pelaksana PPG



Gambar 12. Rekapitulasi Jumlah Peserta yang Terlayani kategori PPG

#### 4) Kegiatan pengujian pendidikan lainnya

Selain 3 (tiga) layanan pengujian pendidikan berskala nasional yang telah disebutkan sebelumnya, BPPP juga menyelenggarakan kegiatan layanan pengujian lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seleksi pada Satker atau instansi lainnya. Berikut ini beberapa layanan pengujian lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2024

## A) Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Kegiatan layanan pengujian pada Politeknik Pariwisata Kemenparekraf dilaksanakan untuk melayani kebutuhan Seleksi Bersama Masuk (SBM) dan Seleksi Mandiri Politeknik Pariwisata Kemenparekraf. Adapun jumlah peserta yang dilayani per Politeknik Pariwisata adalah sebagai berikut.

*Tabel 13. Jumlah Peserta yang Dilayani per Politeknik Pariwisata*

| No           | Nama Politeknik Pariwisata | Jumlah Peserta              |                 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|              |                            | Seleksi Bersama Masuk (SBM) | Seleksi Mandiri |
| 1            | NHI Bandung                | 1.829                       | -               |
| 2            | Bali                       | 1.399                       | 694             |
| 3            | Medan                      | 931                         | 497             |
| 4            | Makassar                   | 476                         | 288             |
| 5            | Palembang                  | 734                         | 449             |
| 6            | Lombok                     | 562                         | 304             |
| <b>TOTAL</b> |                            | 5.931                       | 2.322           |

## B) Seleksi Bakat Skolastik untuk Beasiswa LPDP Kemenkeu Tahun 2024

Seleksi Bakat Skolastik (SBS) untuk Beasiswa LPDP Kemenkeu merupakan layanan Tes Non-Akademik Objektif dari BPPP. Seleksi tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap, BPPP pada tahap 1 di bulan Maret 2024 melayani 12.702 peserta dan tahap 2 di bulan Agustus 2024 melayani 22.695 peserta.

### C) Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura

BPPP juga melayani Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Pelaksanaan Seleksi Mandiri tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 4.795 orang.

#### C. Realisasi Anggaran

##### 1) Capaian Anggaran

Pagu anggaran BPPP dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp. 318.842.584.000. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat kenaikan Pagu yang bersumber dari BLU sehingga Pagu BPPP terkoreksi menjadi Rp. 439.515.548.000. Dari Pagu yang telah terkoreksi tersebut, BPPP berhasil merealisasikan sebesar Rp. 374.175.700.485 dengan persentase daya serap sebesar 85.13%. Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) Sasaran Kinerja dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 14. Rincian Penyerapan Anggaran

| Sasaran Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan                                                     | Anggaran        | Realisasi       | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas | 424.834.075.000 | 361.729.494.349 | 82.95% |
|                                                                                                                    | Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                   | 5.852.595.000   | 4.854.707.924   | 85.15% |
| Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                    | Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                          | 8.828.878.000   | 7.591.498.212   | 85.98% |
|                                                                                                                    | Nilai Kinerja Anggaran                                                         |                 |                 |        |



|  |                                                                 |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 2) Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, BPPP berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 151.477.181.515 atau 34% dari pagu anggaran sebesar Rp. 439.515.548.000. Berikut ini matriks efisiensi anggaran yang telah dihasilkan BPPP pada tahun 2024.



Tabel 15. Matriks Efisiensi Anggaran BPPP 2024

| KRO                                   | RO                                          |           |           |            | Capaian RO (CRO) | Capaian RO per KRO | Capaian RO Per KRO (Max 120 %) | Anggaran                     |                                |        | AAKRO x CRO     | (AAKRO x CRO)- RAKRO | Efisiensi | Konversi Efisiensi -20 s.d. 20 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
|                                       | RO                                          | TVRO      | RVRO      | % (min 1%) |                  |                    |                                | Alokasi Anggaran KRO (AAKRO) | Realisasi Anggaran KRO (RAKRO) | %      |                 |                      |           |                                |
| Kebijakan Bidang IPTEK dan Kebudayaan | Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan    | 1         | 2         | 200.00%    | 124,32%          | 200.00%            | 120.00%                        | 5.852.595.000                | 4.854.707.924                  | 82.95% | 7.023.114.000   | 2.168.406.076        | 34.46%    | 20.00%                         |
| Pelayanan Publik kepada masyarakat    | Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani | 2.377.372 | 3.530.255 | 148.49     |                  | 148.49%            | 120.00%                        | 424.834.075.000              | 361.729.494.349                | 85.15% | 509.800.890.000 | 148.071.395.651      |           |                                |
| Layanan Dukungan Manajemen Internal   | Layanan BMN (SBKU)                          | 1         | 1         | 100.00%    |                  | 100.00%            | 100.00%                        | 8.828.878.000                | 7.591.498.212                  | 85.98% | 8.828.878.000   | 1.237.379.788        |           |                                |
|                                       | Layanan Umum                                | 1         | 1         | 100.00%    |                  |                    |                                |                              |                                |        |                 |                      |           |                                |
|                                       | Layanan Perkantoran                         | 1         | 1         | 100.00%    |                  |                    |                                |                              |                                |        |                 |                      |           |                                |
| TOTAL                                 |                                             |           |           |            |                  |                    |                                | 439.515.548.000              | 374.175.700.485                | 85.13% | 525.652.882.000 | 151.477.181.515      |           |                                |

- Realisasi menggunakan data Realisasi Akrua Sakti per 31 Des 2024

#### D. Kinerja Lain-lain

##### 1) Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

###### A) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Sebagai Satker yang menyediakan layanan pengujian pendidikan yang berkualitas, BPPP berkomitmen terhadap pemenuhan kualitas layanan yang salah satunya dapat diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan. Dalam perumusan instrumen survey agar tepat guna, BPPP telah melakukan inventarisasi terkait draf pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat dalam berbagai konteks atau lini/sektor. Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat (pada bab ini akan diulas terkait survei kepuasan layanan SNPMB, sebagai layanan utama BPPP).

Tabel 16. Survei Kepuasan Layanan SNPMB

| No | Inventarisasi Pertanyaan yang Sering Diajukan                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pertanyaan tentang Proses Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Cara membuat dan mengakses akun SNPMB</li><li>b. Detail proses pendaftaran, termasuk pengisian formulir dan unggah dokumen</li><li>c. Cara memperbaiki kesalahan pengisian data dan dokumen</li></ul> |
| 2  | Pertanyaan tentang Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Syarat umum dan khusus yang diperlukan untuk mendaftar</li><li>b. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan cara mengunggahnya</li></ul>                                                                     |
| 3  | Pertanyaan tentang Ujian Seleksi: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jadwal dan lokasi ujian</li><li>b. Proses jika terjadi kesalahan jadwal atau perlu reschedule</li><li>c. Aturan dan tata tertib selama ujian</li></ul>                                                     |
| 4  | Pertanyaan tentang Hasil Seleksi: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Cara melihat hasil seleksi</li><li>b. Penjelasan mengenai bobot skor dan passing grade</li></ul>                                                                                                           |
| 5  | Pertanyaan tentang Teknis dan Aksesibilitas: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masalah teknis yang sering terjadi pada sistem pendaftaran</li><li>b. Pertanyaan tentang keandalan dan kecepatan akses platform online</li></ul>                                                |

|   |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Pertanyaan tentang Beasiswa dan Biaya Pendidikan:<br>a. Informasi tentang beasiswa, termasuk KIP-Kuliah<br>b. Detail biaya pendidikan dan cara pembayaran               |
| 7 | Pertanyaan tentang Jalur dan Program Studi:<br>a. Informasi mengenai jalur penerimaan yang tersedia<br>b. Detail tentang program studi yang ditawarkan dan kapasitasnya |

Pada proses selanjutnya, instrumen survey ditetapkan untuk selanjutnya dilaksanakan survei terhadap pengguna layanan. Adapun pengguna layanan dalam hal ini dibagi berdasarkan masing-masing perannya dalam pelaksanaan ujian, antara lain: mahasiswa (peserta ujian), pengawas ujian, teknisi (penanggung jawab TIK), dan Penanggung Jawab Lokasi (bertugas dalam hal Sarpras, dan sebagainya). Berdasarkan hasil survei, didapatkan nilai survei dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Hasil Survei Layanan SNBT

|                                                                                                  | Mahasiswa   | Pengawas    | Teknisi     | PJ Lokasi   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Responden                                                                                 | 312.399     | 11.127      | 3.391       | 2.046       |
| Indeks Kepuasan (Gabungan)                                                                       | 91.40017088 | 90.46080219 | 86.80367939 | 81.01727524 |
| Total Jumlah Responden = <b>328.963 orang</b><br>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan = <b>87,42</b> |             |             |             |             |

Berdasarkan tabel tersebut, dari skala 0-100%, sejumlah **87,42%** pelanggan puas dengan berbagai aspek layanan SNBT - UTBK secara garis besar, baik dari sisi informasi yang diterima maupun sistem yang digunakan untuk layanan. Pencapaian tingkat kepuasan pengguna layanan ini telah melebihi target sejumlah **85%**, sebagaimana tertuang pada Kontrak Kinerja BLU tahun 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa target indeks kepuasan telah tercapai dengan persentase capaian **102,8%**.

## B) Pendapatan BLU

Sebagai Satker BLU, pada tahun 2024 BPPP ditargetkan memiliki jumlah pendapatan sebesar **Rp150.288.728.000,00**, sesuai target yang tertuang dalam Kontrak Kinerja BLU tahun 2024. Adapun capaian pendapatan BLU pada tahun 2024 adalah **Rp277.058.678.459,00** sehingga angka ini melebihi target dengan persentase capaian **184,35%**. Capaian yang melebihi target ini sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kapasitas BPPP dalam melayani pengujian berskala besar serta dukungan dari berbagai stakeholder terkait dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan pengujian, meskipun dengan lini masa yang cukup *rigid*.

## 2) Inovasi

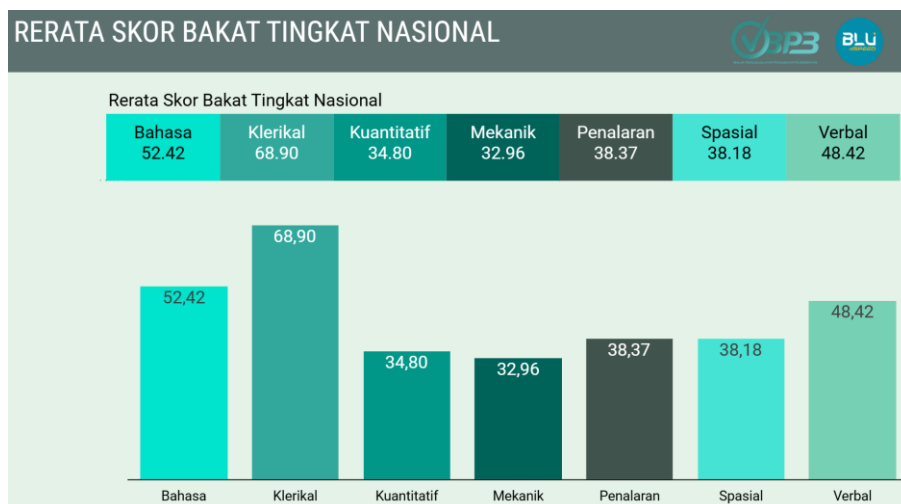
### A) Asesmen Bakat Minat: *“Menggali Potensi, merancang masa depan!”*

Pada tahun 2024, BPPP membuat inovasi produk layanan pengujian pendidikan bagi siswa kelas XII tanpa dipungut biaya dengan meluncurkan Asesmen Bakat Minat (ABM) jenjang SMA sederajat. Berbeda dengan ABM jenjang SMP sederajat yang menggali bakat dan peminatan peserta didik dalam rangka penyalarsan penentuan tujuan jenjang sekolah berikutnya (SMA atau SMK), ABM jenjang SMA sederajat membantu peserta didik dalam menentukan keahlian atau kompetensi apa yang relevan dengan bakat minatnya sehingga dapat lebih mudah mengambil keputusan saat memilih Perguruan Tinggi akademik atau Perguruan Tinggi Vokasi. Diharapkan setelah memasuki jenjang perguruan tinggi, mahasiswa yang sudah terpetakan bakat dan minatnya mampu memiliki motivasi dan daya juang (*resilience*) yang cukup kuat dalam menyelesaikan studinya.

Program ini selaras dengan proses bisnis BPPP terkait Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), terutama dalam memetakan potensi kompetensi peserta didik dan

realisasinya saat mendaftarkan diri dalam SNPMB demi keberlanjutan jenjang karir profesionalnya. Pada asesmen bakat digali tujuh bakat dasar yaitu: verbal, mekanik, klerikal, penalaran, kuantitatif, spasial, dan penggunaan bahasa. Bakat diukur menggunakan tes yang bersifat kognitif dan terdiri dari soal-soal obyektif, sedangkan asesmen minat menggunakan pertanyaan berbentuk likert untuk mengukur kecenderungan pilihan. Secara umum minat dibedakan menjadi minat metodelis yang menunjukkan kesukaan terhadap pengembangan teori serta minat praktis yang menunjukkan kesukaan terhadap keterampilan dan praktik. Seseorang yang minat metodelisnya lebih menonjol akan lebih sesuai melanjutkan ke universitas ataupun institut dengan program sarjana. sebaliknya minat praktis yang menonjol akan relevan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi vokasi atau politeknik.

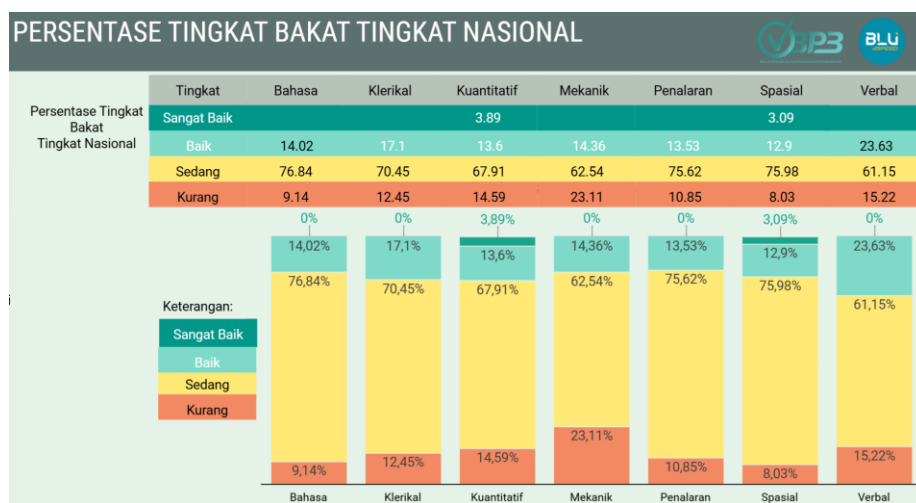
Pada pelaksanaan ABM tahun 2024 ini, hasil yang telah dicapai BPPP terhadap pemetaan bakat siswa sejumlah 1.227.082 siswa kelas XII pada 14.339 sekolah dapat dijabarkan melalui tabel berikut.



Gambar 13. Hasil Pemetaan Bakat

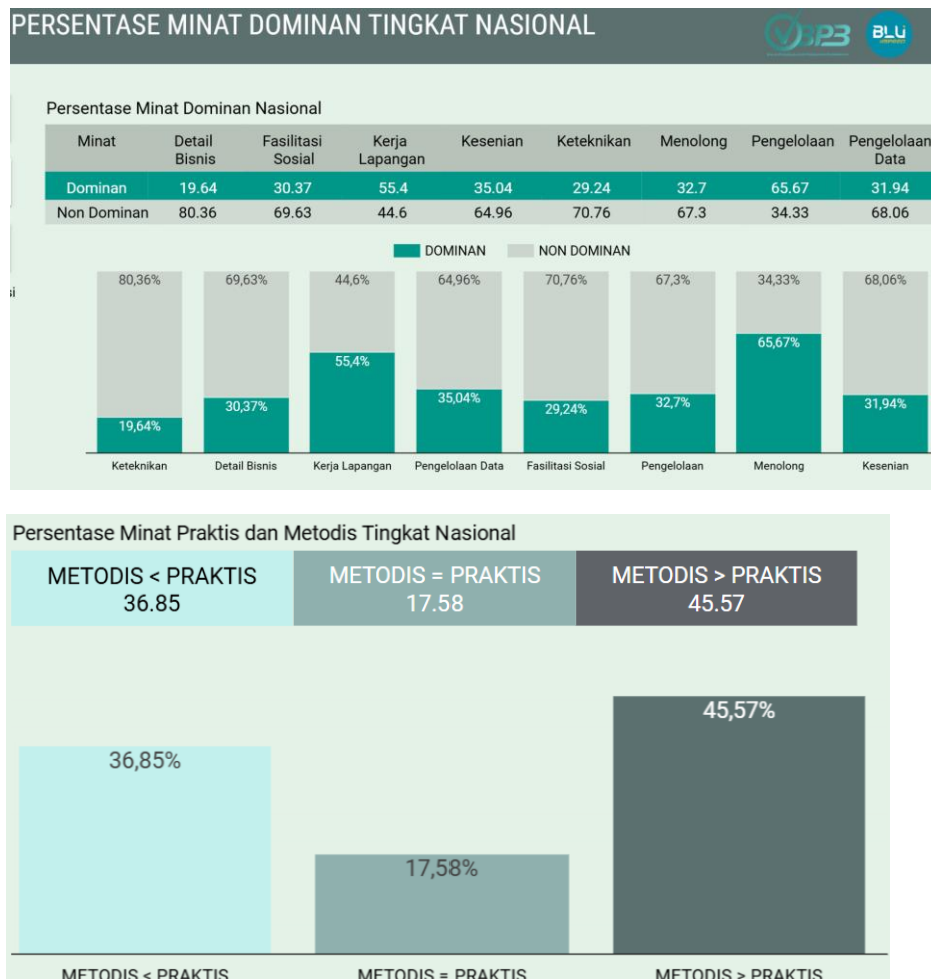
Dari hasil bakat yang sudah terpetakan pada peserta ABM, bakat klerikal yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan bakat yang lainnya. Bakat klerikal merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas-tugas administratif dengan cepat dan teliti. Bakat ini juga dikenal sebagai bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Tugas-tugas klerikal di antaranya

meliputi aktivitas seperti menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, membandingkan, mengumpulkan data, serta menganalisis data. yang relevan dengan pekerja administrasi kantor, analis keuangan, petugas statistik, akuntan, dan lain sebagainya. Adapun persentase terendah adalah bakat mekanik, yang merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mekanik, alat-alat, dan tata kerja mesin. Adapun distribusi dari predikat masing-masing bakat dapat disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 14. Distribusi dari Predikat Bakat

Terkait asesmen terhadap minat peserta ujian ABM 2024, berikut ini pemetaan minat yang telah disajikan dalam kategori dominan dan non dominan, serta komposisi minat praktis dan metodelis oleh masing-masing peserta ujian jika dibandingkan.



Gambar 15. Persentase Minat Praktis dan Metodelis

Dari kedua jenis asesmen (bakat dan minat) yang telah terpetakan, maka didapatkan sebaran atau distribusi berupa matriks kesesuaian antara bakat dan minat pada level nasional, sebagaimana matriks berikut.

| Minat             | Spasial | Verbal  | Penalaran | Klerikal | Mekanik | Kuantitatif | Bahasa  |
|-------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|-------------|---------|
| Fasilitasi Sosial |         | 74.425  |           |          |         |             | 41.528  |
| Pengelolaan       |         |         | 51.889    | 65.213   |         |             |         |
| Detail Bisnis     |         |         |           | 62.589   |         | 66.515      |         |
| Pengelolaan Data  |         |         | 62.955    |          |         | 91.712      |         |
| Keteknikan        | 38.608  |         | 29.949    |          | 40.391  |             |         |
| Kerja Lapangan    | 102.462 |         | 91.852    | 112.406  |         |             |         |
| Kesenian          | 60.184  |         |           |          |         |             | 50.842  |
| Menolong          |         | 203.526 | 114.907   |          |         |             | 119.952 |

Keterangan:  
Data yang muncul pada matriks kesesuaian bakat dan minat menunjukkan jumlah peserta didik yang memiliki bakat pada kategori Baik atau Sangat Baik serta Minat Dominan.  
Kategori Baik dan Sangat Baik distandarisasi secara nasional.

Gambar 16. Matriks Kesesuaian antara Bakat dan Minat

Dari matriks di atas, melalui pelaksanaan Asesmen Bakat Minat, dapat memberikan insight dan informasi yang komprehensif bagi para stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mengambil keputusan strategis terkait keberlanjutan karir profesional peserta didik. Pelaksanaan Asesmen Bakat Minat kelas XII layak untuk dijadikan kebijakan prioritas pada periode-periode selanjutnya.

## B) Strategi Kemandirian Keuangan BPPP: *“Mengelola Stabilitas Pendapatan melalui Diversifikasi Sumber Pendapatan”*

Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), Balai Pengukuran dan Pengujian Pendidikan (BPPP) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendiversifikasi sumber pendapatannya guna menjaga stabilitas finansial. Dalam upayanya menuju kemandirian finansial, BPPP berhasil mengembangkan berbagai program pendapatan yang tersebar di berbagai akun, dengan total realisasi sebesar Rp277.058.678.459,00. Adapun ikhtisar pendapatan dapat dijabarkan melalui matriks berikut.

| Akun         | Program                                | Nominal Pendapatan        |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 424119       | SNBT                                   | 122.686.000.000,00        |
|              | Seleksi Masuk PPG                      | 12.724.000.000,00         |
|              | Kelulusan PPG Calon Guru               | 42.147.032.500,00         |
|              | Kelulusan PPG Dalam Jabatan            | 9.681.400.000,00          |
|              | Kelulusan PPG Guru Tertentu            | 85.523.409.150,00         |
|              | LPDP                                   | 884.308.143,00            |
|              | POLTEKPAR                              | 384.006.669,00            |
|              | SM UNTAN                               | 219.964.000,00            |
| 424911       | Jasa Layanan Perbankan                 | 2.567.718.570,00          |
| 424915       | Pengembalian Belanja TYAL (BLU)        | 15.318.463,00             |
| 424919       | Pendapatan Lain-lain: uji coba SNBT    | 150.000,00                |
|              | Pendapatan Lain-lain: Pendaftaran SNBT | 36.787.500,00             |
| 425912       | Pengembalian Belanja TAYL (RM)         | 188.583.464,00            |
| <b>Total</b> |                                        | <b>277.058.678.459,00</b> |

Gambar 17. Ikhtisar Pendapatan BPPP 2024

Akun 424119 mencakup Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya yang terdiri dari program SNBT, Seleksi Masuk PPG, dan berbagai jenis kelulusan PPG (Calon Guru, Dalam Jabatan, dan Guru Tertentu), menjadi penyumbang terbesar dengan total pendapatan Rp273.275.120.462,00. Program SNBT sendiri mencatat pendapatan tertinggi, mencapai Rp122.686.000.000,00, diikuti oleh Kelulusan PPG Guru Tertentu dengan Rp85.523.409.150,00. Diversifikasi ini menunjukkan keberhasilan BPPP dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan sumber pendapatan yang beragam. Selain itu, BPPP juga mendapatkan kontribusi signifikan dari akun 424911 yakni pendapatan berupa Jasa Layanan Perbankan dengan pendapatan sebesar Rp2.567.718.570,00.

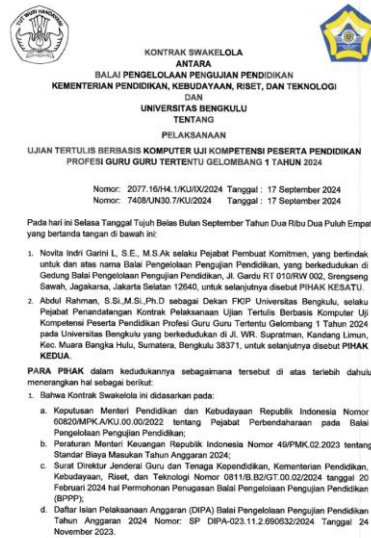
Strategi diversifikasi ini tidak hanya memastikan stabilitas pendapatan tetapi juga memperkuat posisi BPPP sebagai BLU yang semakin mandiri, dengan mengurangi ketergantungan pada dana APBN. Dengan pendekatan ini, BPPP dapat terus memenuhi tanggung jawab operasionalnya dan meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat kembali mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai program dan layanan yang dikelolanya.

### 3) Program Crosscutting/Collaborative

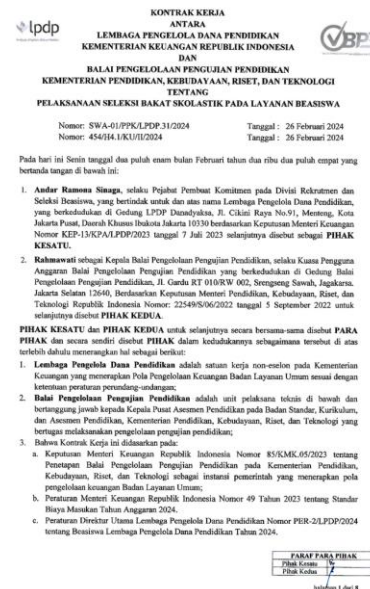
Sebagai Satker BLU yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi pengujian pendidikan berskala nasional yang berdampak langsung pada pengembangan karier individu, BPPP perlu dukungan dari berbagai stakeholder terutama dalam penyediaan lokasi layanan pengujian bagi peserta ujian dari berbagai wilayah di Indonesia. Di lain pihak, beberapa stakeholder yang memanfaatkan layanan pengujian pendidikan dari BPPP juga turut merasakan dampak dari kontribusi BPPP dalam memenuhi kebutuhan akan seleksi melalui pengujian terstandar dan berkualitas, misalnya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), beasiswa LPDP, Seleksi Politeknik Pariwisata, dan sebagainya. Di samping itu, kontribusi layanan BPPP juga berdampak positif dalam mendukung pencapaian output kinerja Satker pada sektor lain, misalnya: penuntasan sertifikasi pendidik oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program crosscutting/collaborative sangat identik dengan proses bisnis BPPP dalam menyediakan layanan pengujian pendidikan yang berkualitas.

Berikut ini beberapa contoh dokumen kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program crosscutting/collaborative yang telah diimplementasikan selama tahun 2024.

## Perjanjian Kerja Sama BPPP dengan Direktorat PPG, Ditjen GTK pada pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta PPG



## Perjanjian Kerja Sama BPPP dengan LPDP pada pelaksanaan Seleksi Bakat Skolastik



## Perjanjian Kerja Sama BPPP dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam Pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)



## PERJANJIAN KERJA SAMA

Pejabat Pembuat Komitmen SNPMB dengan  
Penanggung Jawab Keuangan Pekerjaan Ujian Tulis  
Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes  
(UTBK-SNBT) pada Seleksi Nasional Penerimaan  
Mahasiswa Baru (SNPMB)



**KONTRAK KERJA  
ANTARA**  
**BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG**  
**UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER  
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (UTBK-SNBT)  
PADA  
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
TAHUN 2024**

Nomor: 165/III/PPS/2024 Tanggal: 13 Maret 2024  
Nomor: BJ/967.16/UN34/774.00.02/2024 Tanggal: 13 Maret 2024

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arya Gusma Aditia, S.Si, MT  
jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Garuda RT 016/RW 002, Srengeng Sawah, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Lantia Dwi Prasetyo, ST, M.Pd  
jabatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta, selaku Penanggung Jawab Keuangan Pekerjaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2024 pada Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Colombo No.1, Karangmalang Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** dalam kesepakatannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Balai Kontrak Kerja ini didasarkan pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2338/MPK/K/2024 tentang Pejabat Pembendaharaan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
  - e. Peraturan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor: 01/Pec-SNPMB/2024 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) SNPMB 2024;
  - f. Peraturan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor: 02/Pec-SNPMB/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024;

## BAB IV

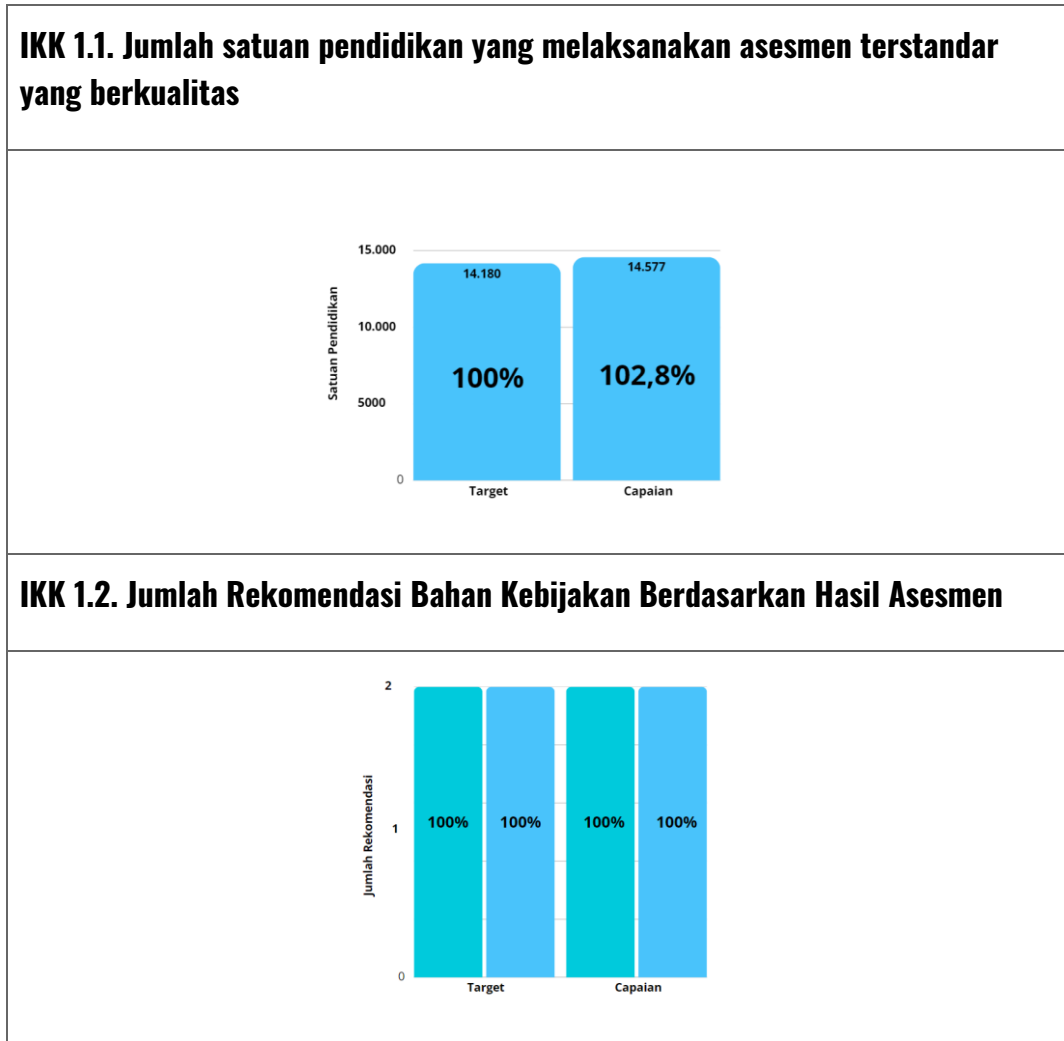
### PENUTUP

Selama tahun 2024, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja, maupun Kontrak Kinerja sebagai Badan Layanan Umum. Berikut ini disampaikan ringkasan pencapaian indikator kinerja selama tahun 2024.

Sebagai Unit Pelayanan Teknis dari Pusat Asesmen Pendidikan, capaian kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan tahun 2024 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Asesmen Pendidikan, dan merupakan tahun akhir pada periode Renstra 2020-2024. Adapun capaian kinerja berdasarkan sasaran kinerja beserta target indikator kinerja pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sasaran kinerja 1 “Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan” terkait indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas” ditargetkan sebesar **14.180** satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, telah dilayani pelaksanaan asesmen pendidikan pada **14.577** satuan pendidikan (**102,8%**). Sedangkan target tahun 2024 untuk indikator kinerja “Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen” sebesar **2** rekomendasi, telah dihasilkan **2** rekomendasi bahan kebijakan (capaian **100%**).

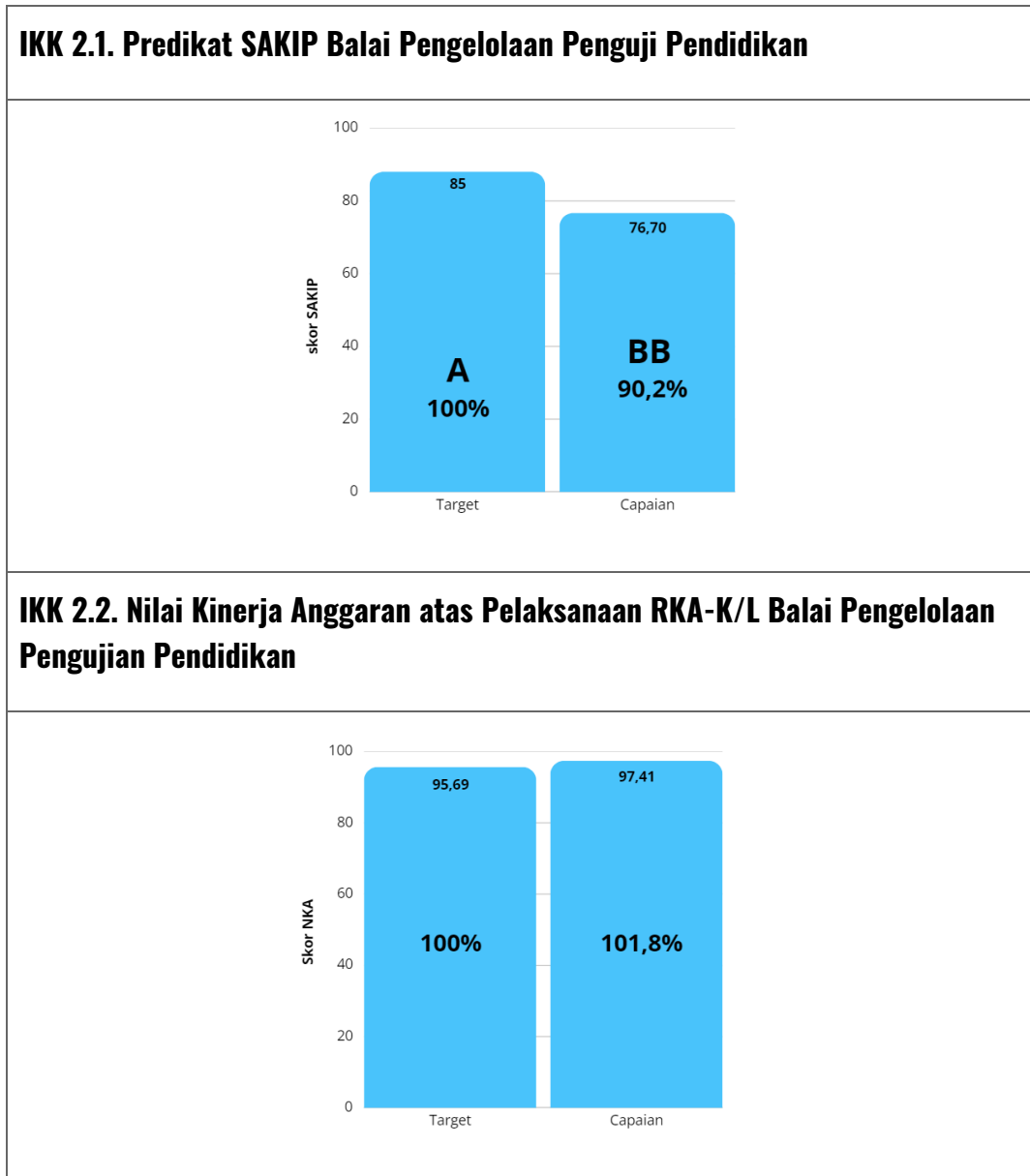
Gambar 18. Diagram Capaian Sasaran Kegiatan 1



- Sasaran kinerja 2 “Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan” untuk indikator kinerja Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ditargetkan mencapai predikat A. Namun, sebagai Satker yang baru berdiri di akhir 2022 dan baru pertama kalinya dinilai pada 2024, capaian predikat SAKIP BPPP adalah predikat **BB** (capaian maksimal untuk Satker yang baru dinilai), dengan skor SAKIP = **76,70** (berdasarkan LHE AKIP Inspektorat Jenderal pada Desember 2024). Sebagai hasilnya, persentase capaian predikat SAKIP BPPP tahun 2024 jika dibandingkan target predikat **A** (skor 85) adalah sebesar **90,2%**. Adapun IKK “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan” pada 2024 ditargetkan sebesar **95,69** poin, dan telah

dicapai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar **97,41** poin (persentase capaian sebesar **101,8%**).

*Gambar 19. Diagram Indikator Capaian Sasaran Kegiatan 2*



Keberhasilan tersebut merupakan dasar bagi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi pada tahun ini akan menjadi bahan pembelajaran, dan terus dilakukan

perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, antara lain yaitu proses pencatatan penerimaan, pengesahan pendapatan, dan pengesahan pengeluaran PNPB yang masih dilakukan secara manual. Jumlah kontrak kerjasama dengan mitra pelaksana layanan yang sangat banyak. Pembuatan kontrak baru untuk setiap periode ujian, yang menyebabkan volume verifikasi dan validasi dokumen kontrak yang sangat tinggi. Target penyelesaian sertifikasi Guru Tertentu yang belum terjadwal mengakibatkan padatnya pelaksanaan UKPPPG, dengan jumlah peserta yang semakin meningkat dibandingkan tahun 2023.

Untuk mengantisipasi hal tersebut agar target indikator kinerja tetap dapat tercapai, beberapa langkah yang telah diambil antara lain:

1. Rencana perjanjian kerjasama yang telah disiapkan pada pertengahan bulan Desember tahun sebelumnya, sehingga pada bulan Januari sudah siap untuk ditandatangani dan tidak mengalami hambatan saat pengajuan pencairan dana.
2. Sistem pencatatan pendapatan dan pengeluaran BLU yang masih dilakukan secara manual, sehingga belum tersedia dashboard yang menyajikan data secara lengkap dan terintegrasi. Oleh karena itu, pada tahun 2024 telah dilakukan studi perbandingan dan adopsi sistem keuangan yang telah terbukti handal, modern, dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana BLU. Diharapkan pada tahun 2025, pencatatan dan pelaporan keuangan BLU sudah dapat dilakukan secara terintegrasi.
3. Penyederhanaan prosedur kontrak swakelola, dengan membuat satu kontrak induk di awal periode yang mencakup berbagai produk layanan pengujian selama satu tahun kontrak. Sebagai contoh, pada kontrak Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yang direncanakan untuk tahun 2024 akan dilakukan dalam 4 tahap, namun kontrak yang akan dipersiapkan mencakup seluruh periode satu tahun. Sementara itu,

pencairan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahapan pelaksanaan dan sesuai dengan periode anggaran yang berlaku.

Dengan langkah-langkah antisipasi ini, diharapkan tantangan yang ada dapat diatasi dengan lebih efisien, dan target indikator kinerja dapat tercapai dengan optimal.

Selain itu, seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa BPPP telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana akan mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

Beberapa fokus utama yang akan menjadi prioritas sebagai satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dalam periode mendatang, meliputi:

## **1. Identifikasi Potensi Bisnis dan Diversifikasi Layanan**

Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah melakukan identifikasi dan pengembangan potensi bisnis serta diversifikasi layanan untuk memperkuat daya saing organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peluang baru dalam sektor pendidikan dan kebudayaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Program ini akan melibatkan riset pasar, analisis tren industri pendidikan dan kebudayaan, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan publik untuk menghasilkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Langkah diversifikasi ini diharapkan dapat membuka jalur pendapatan baru bagi BPPP, sekaligus memperluas cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Dengan demikian, BPPP tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan layanan seleksi individu, tetapi juga sebagai pionir dalam mengembangkan model-model bisnis yang berkelanjutan di bidang pendidikan seperti pelatihan pembuatan soal, sertifikasi dan konsultasi.

Layanan Pelatihan, Sertifikasi, dan Konsultasi adalah rangkaian jasa profesional yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi individu maupun organisasi melalui pendekatan berbasis kebutuhan, standar, dan inovasi. Berikut cakupan dan definisinya:

- 1) Layanan Pelatihan Jasa pelatihan teknis dengan lingkup pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengelola pendidikan, dan pihak terkait lainnya dalam mengelola, melaksanakan, dan menganalisis proses evaluasi pendidikan. Pelatihan dapat berfokus pada pengelolaan tes dan asesmen, termasuk pelatihan terkait pembuatan soal, penggunaan teknologi untuk tes berbasis komputer (CBT), serta teknik analisis hasil ujian. Pelatihan ini juga meliputi pemahaman tentang standar evaluasi pendidikan yang diterapkan dalam asesmen terstandar yang bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan dengan metode yang efektif, valid, dan sesuai dengan standar nasional.
- 2) Layanan Sertifikasi Proses pemberian pengakuan formal atas kompetensi individu berdasarkan standar tertentu. Layanan ini mencakup:
  - a) Pelaksanaan asesmen untuk memastikan kualifikasi peserta sesuai standar nasional atau internasional.
  - b) Sertifikasi kompetensi di bidang pendidikan, pengelolaan tes, atau keterampilan spesifik lainnya.
  - c) Kerja sama dengan lembaga sertifikasi resmi untuk menjamin keabsahan sertifikat yang diterbitkan.

### 3) Layanan

### Konsultasi

Jasa profesional yang memberikan solusi strategis dan berbasis kebutuhan kepada individu atau organisasi. Konsultasi meliputi:

- a) Dukungan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan atau evaluasi pendidikan.
- b) Rekomendasi tentang penerapan teknologi untuk pengelolaan tes dan asesmen.
- c) Strategi peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi proses evaluasi berbasis standar nasional maupun internasional.

Layanan Pelatihan, Sertifikasi, dan Konsultasi mendukung peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui pelatihan, sertifikasi, dan konsultasi strategis. Fokusnya pada pengelolaan evaluasi pendidikan, penerapan teknologi, dan analisis hasil ujian sesuai standar nasional untuk memastikan hasil yang valid, efektif, dan berkelanjutan.

## 2. Penguatan ZI-WBK (Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi)

Penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) akan menjadi salah satu prioritas penting dalam periode mendatang. Untuk menciptakan organisasi yang bersih, akuntabel, dan transparan, BPPP akan mengimplementasikan sistem manajemen yang lebih efisien, memperkuat pengawasan internal, serta mengoptimalkan mekanisme pelaporan dan pengaduan.

Program penguatan ZI-WBK ini juga mencakup penguatan budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemahaman terhadap tata kelola yang baik dan benar akan terus didorong, serta memperkenalkan alat ukur yang lebih tepat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja. Selain itu, pengembangan sistem digitalisasi yang dapat mendukung transparansi dalam pelayanan juga akan menjadi salah satu fokus utama dalam mencapai status ZI-WBK.

### 3. Peningkatan Kualitas SDM

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama bagi keberhasilan organisasi, oleh karena itu, program peningkatan kualitas SDM akan menjadi program yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan BPPP. Tahun 2025, BPPP akan fokus pada pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai, mulai dari pelatihan teknis, manajerial, hingga peningkatan soft skills yang dibutuhkan di era digital dan global.

BPPP akan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan program-program pengembangan kapasitas yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Selain itu, penguatan budaya inovasi, kolaborasi, serta penerapan prinsip-prinsip kerja berbasis hasil akan terus digalakkan, sehingga para pegawai dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

### 4. Remunerasi

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, program remunerasi yang adil dan berkeadilan akan menjadi perhatian utama. BPPP pada tahun 2024 telah membuat kajian Remunerasi, dan sedang proses reviu oleh Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pengajuan remunerasi disesuaikan dengan tingkat kinerja individu dan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi. Oleh karena itu, sistem penghargaan dan pengakuan yang berbasis pada prestasi akan diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan remunerasi. Pengajuan remunerasi juga menyesuaikannya dengan tuntutan serta kondisi ekonomi terkini, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dengan adanya penghargaan yang memadai, diharapkan dapat mendorong pegawai untuk terus berinovasi dan bekerja lebih maksimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



Dengan implementasi program-program ini, diharapkan BPPP dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih optimal, menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan produktif, serta berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

## LAMPIRAN

### Perjanjian Kinerja 2024 (Awal)



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan**  
**Dengan**  
**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Rahmawati**  
**Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan**  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Anindito Aditomo**  
**Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Anindito Aditomo  
NIP 197908262023211002

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian  
Pendidikan,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Rahmawati  
NIP 197908232003122002



**Catatan :**

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



| Sasaran (S/SK)                                                                                                           | Indikator (IKU/IKK)                                                                          | Target Perjanjian Kinerja 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | 14180                          |
| [1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | 2                              |
| [2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                    | [2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | A                              |
| [2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                    | [2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | 95.69                          |

| No             | Kode | Nama Kegiatan                                                                                               | Alokasi               |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.             | 2029 | Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan                                                                     | Rp. 308.989.831.000,- |
| 2.             | 2032 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud | Rp. 9.852.753.000,-   |
| Total Anggaran |      |                                                                                                             | Rp. 318.842.584.000,- |

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,


 Ditandatangani secara elektronik  
 oleh :  
 Anindito Aditomo  
 NIP 197908262023211002

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan,


 Ditandatangani secara elektronik  
 oleh :  
 Rahmawati  
 NIP 197908232003122002



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



## Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi)



### Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Dengan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati  
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Anindito Aditomo  
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Badan Standar, Kurikulum,  
dan Asesmen Pendidikan  
Anindito Aditomo



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian  
Pendidikan  
Rahmawati



Catatan :  
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

| Sasaran                                                                                                                   | Indikator                                                                                        | Satuan                | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| [SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan | [IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas         | Satuan Pendidikan     | 14180  |
|                                                                                                                           | [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen                           | Rekomendasi Kebijakan | 2      |
| [SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                                    | [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan                                  | Predikat              | A      |
|                                                                                                                           | [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan | Nilai                 | 95.69  |

| No                    | Kode | Nama Kegiatan                                                                                               | Anggaran                  |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                     | 2029 | Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan                                                                     | Rp 429.185.700.000        |
| 2                     | 2032 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud | Rp 8.828.878.000          |
| <b>Total Anggaran</b> |      |                                                                                                             | <b>Rp 438.014.578.000</b> |

Jakarta, 18 Desember 2024

  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Badan Standar, Kurikulum,  
 dan Asesmen Pendidikan  
 Anindito Aditomo

  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Balai Pengelolaan Pengujian  
 Pendidikan  
 Rahmawati



Catatan :  
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Pernyataan Reviu Laporan Kinerja BPPP Tahun 2024

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

#### LAPORAN KINERJA

**BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Januari 2025  
Ketua Tim Reviu,



Novita Indri G. L., S.E., M.SAk.  
NIP. 197611252015042001